



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU  
TAHUN 2024



## PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU



H. YAUMIL AMBO DJIWA, SH  
BUPATI PASANGKAYU



## PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU



DR. Hj. HERNY, S.Sos., M.Si  
WAKIL BUPATI PASANGKAYU



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Esa, atas rahmat dan Ridho-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023. Penyusunan Laporan ini merupakan upaya pemerintah Kabupaten Pasangkayu dalam kerangka implementasi transparansi, akuntabilitas dan partisipatif sebagai syarat terciptanya tata pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) serta merupakan media pertanggung jawaban Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021 – 2026.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Pasangkayu Tahun 2023 ini dimaksudkan sebagai media pertanggung jawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Laporan ini menggambarkan tingkat pencapaian kinerja, keberhasilan dan atau kegagalan di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dalam LAKIP ini kami berusaha melaporkan apa yang direncanakan sesuai dokumen perencanaannya dan sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat. Diharapkan LAKIP Tahun 2023 ini mendapatkan umpan balik perbaikan kinerja Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang, sehingga semakin mampu memperlihatkan pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi. Dengan demikian pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di Daerah lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Akhir kata, Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LAKIP Kabupaten Pasangkayu tahun 2023, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media



pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.

Pasangkayu, Maret 2023

**BUPAT PASANGKAYU**

**H. YAUMIL AMBO DJIWA**



## DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	<b>16</b>
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>47</b>
	3.1. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022	47
	3.2. Analisis Capaian Kinerja	69
	3.3. Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022	128
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>135</b>

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Laporan Realisasi APBD Daerah Tahun 2022



## Ringkasan Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu disusun berdasarkan ketentuan teknis yang digariskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, guna memenuhi kewajiban instansi pemerintah dalam melakukan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi yang diamanatkan kepada setiap instansi pemerintah.

LAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2023 ini lebih menekankan pada analisis di tataran atau dimensi outcome dari pada output. Hal ini dimaksudkan agar kinerja organisasi yang telah dicapai dapat lebih terukur berdasarkan azas manfaat, dari pada sekedar pencapaian output kegiatan. Sehingga dengan demikian, analisis pada LAKIP ini lebih mengulas dan mendalami kapasitas makro organisasi dengan baseline pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Kinerja yang diukur dalam LAKIP ini didasarkan atas dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasangkayu tahun 2021-2026. Penetapan indikator kinerja didasarkan pada indikator kinerja yang tercantum pada perencanaan strategi Pemerintah Kabupaten Pasangkayu tahun 2023. Sedangkan pengukurannya dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja, baik kegiatan maupun sasaran dengan realisasi pencapaiannya.

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa secara umum penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pasangkayu telah berhasil mencapai sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut terlihat dari tingkat capaian kinerja sasaran yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran yang mempunyai kecenderungan naik. Meskipun dari 13 (tiga belas) sasaran yang telah ditetapkan, masih ada sasaran yang terelisasi di bawah 90 persen.



Hasil pengukuran kinerja atas kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk Tahun 2023 menunjukkan prosentase yang relatif cukup memuaskan. Namun tidak dapat di pungkiri beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dalam Tahun 2023 yaitu dukungan dana/biaya serta perlunya tambahan personil yang tidak hanya dari segi kuantitas (*quantity*) akan tetapi juga memenuhi syarat kualitas (*quality*).

Namun dalam kondisi keterbatasan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu tetap mampu secara maksimal mewujudkan visi dan misi serta tujuan dan sasaran melalui implementasi kebijakan dalam program / kegiatan yang terarah dan terpadu. Hal ini tidak saja karena telah dapat memanfaatkan sarana/prasarana kerja dan dana/biaya meski dalam kondisi terbatas, namun juga didukung oleh semangat (*etos kerja*) serta komitmen kuat dalam percepatan pembangunan daerah.

Ke depan, diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2023, kondisi akan lebih baik dan ketersediaan sumber daya manusia baik aspek kuantitas maupun kualitas sudah harus terdistribusi diseluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**



## **LAPORAN AKUNTABILITAS**

## **KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

## **TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU**

**TAHUN 2024**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/ MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selanjutnya, sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; setiap Pemerintah Daerah (Pejabat Eselon II) diminta untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Presiden, sebagai perwujudan dan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance.

Bertitik tolak dari RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021 – 2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasangkayu Tahun 2023 dan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LAKIP Tahun 2023 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran, dengan demikian LAKIP Kabupaten Pasangkayu menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Bupati kepada Presiden ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LAKIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2023 yaitu tahun pertama RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021 – 2026.

## **1.2. KONDISI KABUPATEN PASANGKAYU**

### **1. Letak Wilayah Geografis**

Kabupaten Pasangkayu merupakan wilayah administratif di bawah pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat dengan luas wilayah 18,13 persen dari total wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Serupa dengan wilayah lain di Provinsi Sulawesi Barat, beberapa desa/kelurahan di Kabupaten Pasangkayu terletak di wilayah pantai. Dari total 12 kecamatan yang ada, hanya Kecamatan Duripoku dan Kecamatan Bulu Taba yang desa/kelurahannya tidak satupun berada di wilayah pantai. Sebaliknya, hanya Kecamatan Sarjo yang seluruh desanya terletak di

wilayah pantai. Perbedaan kondisi geografis ini memberikan keuntungan terhadap masyarakat Kabupaten Pasangkayu karena masing-masing wilayah dapat melakukan spesialisasi pada sektor tertentu agar seluruh kecamatan dapat berkembang secara merata. Kecamatan dengan wilayah yang seluruhnya bukan pantai dapat unggul dalam sektor pertanian ataupun perkebunan. Sedangkan, kecamatan dengan wilayah pantai dapat menonjolkan sektor perikanan.

**Tabel 1.1****Letak Geografis Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu**

Kecamatan	Jumlah Desa	Letak Desa	
		Pantai	Bukan Pantai
Sarudu	5	2	3
Dapurang	5	1	4
Duripoku	4	-	4
Baras	6	3	3
Bulu Taba	7	-	7
Lariang	7	2	5
Pasangkayu	6	3	3
Tikke Raya	5	4	1
Pedongga	4	1	3
Bambalamotu	6	4	2
Bambaira	4	3	1
Sarjo	4	4	-

Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu

**2. Luas Wilayah**

Kabupaten Pasangkayu memiliki wilayah seluas 3.043,75 Km<sup>2</sup>. Secara administratif terdiri dari 12 (dua belas) wilayah Kecamatan, 4 (empat) Kelurahan dan 59 (lima puluh sembilan) Desa.

**Tabel 1.2**  
**Luas Daerah, Persentase, Jumlah dan Kelurahan Menurut**  
**Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021**

<b>Kecamatan</b>	<b>Luas (Km2)</b>	<b>Persentase</b>	<b>Jumlah Desa/UPT Total</b>	<b>Jumlah Kelurahan Total</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
Sarudu	99,06	3,19	5	-
Dapurang	921,95	30,56	5	-
Duripoku	215,45	7,14	4	-
Baras	277,87	9,04	5	1
Bulu Taba	428,62	14,21	7	-
Lariang	83,34	2,68	7	-
Pasangkayu	312,04	10,21	4	2
Tikke Raya	266,59	8,63	5	-
Pedongga	94,00	3,03	4	-
Bambalamotu	242,96	8,00	5	1
Bambaira	64,84	2,11	4	-
Sarjo	37,03	1,20	4	-
<b>Jumlah/Total</b>	<b>3 043,75</b>	<b>100,00</b>	<b>59</b>	<b>4</b>

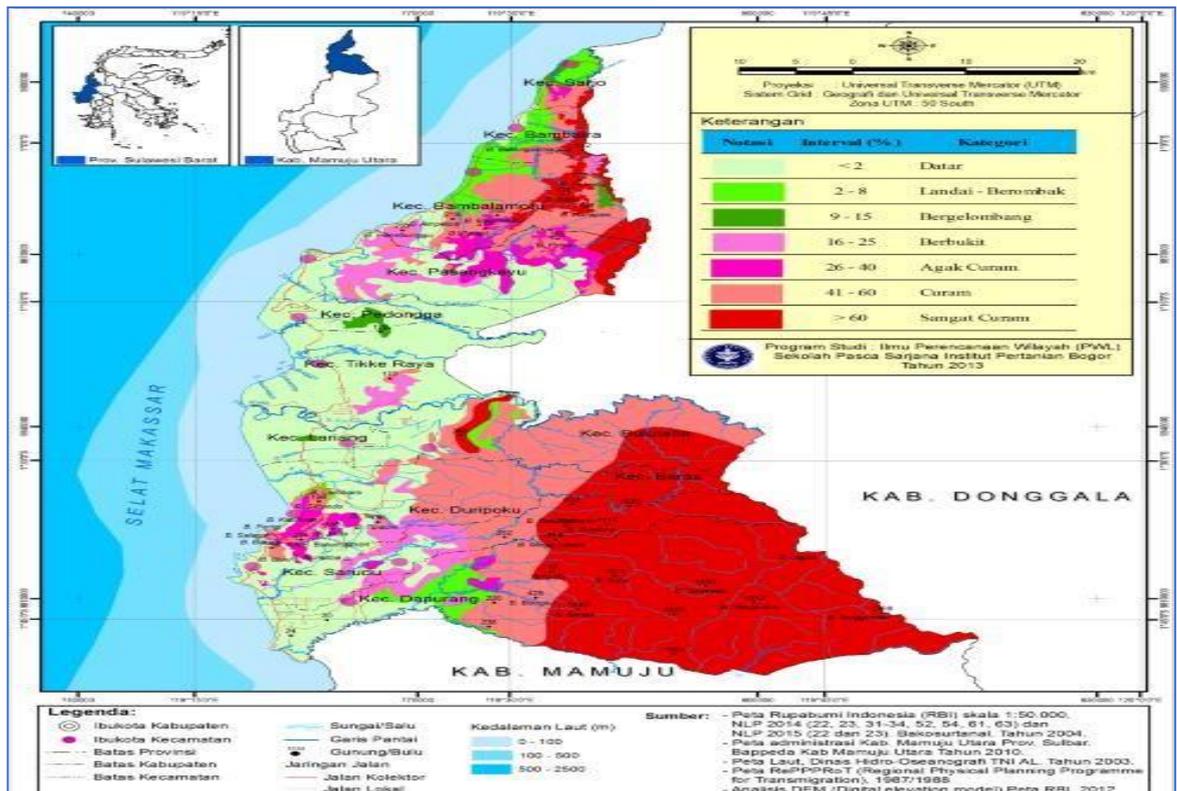
Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Pasangkayu

### 3. Topografi

Berdasarkan kondisi topografi wilayah, Kabupaten Pasangkayu memiliki karakteristik bentang lahan yang sangat beragam. Secara umum ketinggian wilayah ini berada pada 4-38 meter di atas permukaan laut (mdpl). Kelerengan dengan kategori terjal (41-60 %) dan sangat terjal (> 60%) menempati areal terluas dan lebih dari setengah luas wilayah Kabupaten Pasangkayu, sedangkan lahan yang tergolong datar (< 2 %) dan landai berombak (2-8 %) mencapai 36 persen dari luas wilayah. Topografi wilayah dengan kategori bergelombang, berbukit dan agak terjal hanya mencapai 9 % dari luas wilayah Kabupaten Pasangkayu. Kelerengan lahan merupakan salah satu faktor dalam menentukan kesesuaian atau daya dukung lahan. Kecamatan Pasangkayu merupakan daerah dengan ketinggian terendah yaitu 4 mdpl,

sementara Kecamatan Bulu Taba menjadi daerah dengan wilayah tertinggi di atas permukaan laut (38 mdpl).

**Gambar 1.1**  
**Peta Lereng Kabupaten Pasangkayu**



Sumber: Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah IPB

#### 4. Karakteristik Wilayah

Berdasarkan pusat-pusat pertumbuhan, wilayah Kabupaten Pasangkayu terbagi atas 4 wilayah pertumbuhan yaitu Sadadu (Sarjo/Dapurang/Duripoku), Babula (Baras/Bulutaba/Lariang), Papeti (Pasangkayu/Pedongga/Tikke Raya) dan Bambarasa (Bambalamotu/Bambaira/Sarjo).

#### 5. Aparat Pemerintah

Keadaan Aparat Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk mendukung kegiatan pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan masyarakat pada tahun 2021 sejumlah 3.291 orang yang terdiri dari Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut:

- a) Golongan I : 4 orang, Golongan II : 629 orang, Golongan III : 2.072 orang, Golongan IV : 511 orang.
- b) Jabatan Struktural yang terdiri dari, Eselon II : 37 orang, Eselon III : 147 orang, Eselon IV : 175 orang.
- c). Jabatan Fungsional sebanyak 2.766 orang.
- d). Tingkat Pendidikan : SD 0 orang , SMP 10 orang, SLTA 650 orang, Diploma 434 orang, S1 1.922 orang, S2 sebanyak 194 orang dan S3 sebanyak 6 orang.

**Tabel 1.3**  
**Banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut**  
**Golongan dan Jenis kelamin**

GOLONGAN	JENIS KELAMIN		TOTAL
	PRIA	WANITA	
GOLONGAN I	3	1	4
GOLONGAN II	325	304	629
GOLONGAN III	886	1186	2072
GOLONGAN IV	272	239	511
<b>TOTAL</b>	<b>1.486</b>	<b>1.730</b>	<b>3.216</b>

Sumber : BKPPD Kabupaten Pasangkayu

**Tabel 1.4**  
**Banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut**  
**Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin**

TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI		TOTAL	
	PRIA	WANITA		
SD / Primary School	-	-	-	
SLTP / Secondary School	9	1	10	
SLTA / Senior High School	362	288	650	
Akademi / Bachelor Degree	D I	2	1	3
	D II	22	44	66
	D III	68	264	332
	D IV	16	17	33

S 1 / Degree	882	1.042	1.922
S 2 / Magister	120	74	194
S 3 / Doktor	5	1	6
<b>TOTAL</b>	<b>1.486</b>	<b>1.730</b>	<b>3.216</b>

Sumber : BKPPD Kabupaten Pasangkayu

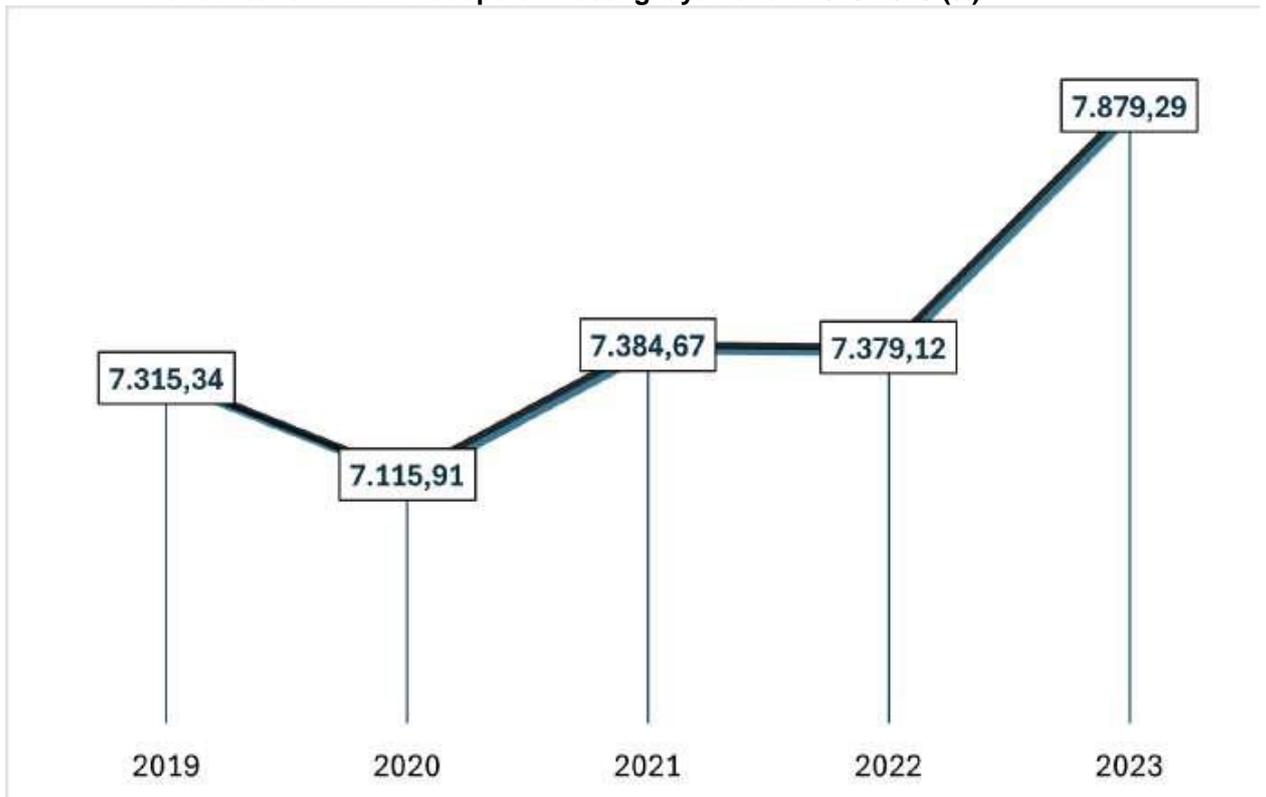
Upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Aparat Pemerintah Kabupaten Pasangkayu telah melakukan berbagai program melalui pemberian penghargaan, pendidikan pelatihan teknis umum dan fungsional, serta pembinaan.

## 6. Perekonomian.

### a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku yang terbesar pada tahun 2023 adalah di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu sebesar 48,10 persen. Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2023 yang terbesar adalah sektor Industri Pengolahan sebesar 16,40 persen. Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (Kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan dua pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

**Gambar 1.2.**  
**Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2023 (%)**



Catatan: 2022 Angka Sementara  
2023 Angka Sangat Sementara  
Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu

### b. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator ini biasanya digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijaksanaan pembangunan yang akan datang. Untuk mengukur besarnya laju pertumbuhan tersebut dapat dihitung dari data PDRB atas dasar harga konstan.

**Gambar 1.3.**

**Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 (%)**

Kabupaten	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Provinsi Sulawesi Barat	-2,34	2,57	2,31	5,25
Kabupaten Majene	-1,38	2,13	2,39	5,28
Kabupaten	-1,58	1,87	3,58	4,58

<b>Polewali Mandar</b>				
<b>Kabupaten Mamasa</b>	<b>-1,27</b>	<b>2,00</b>	<b>1,79</b>	<b>2,72</b>
<b>Kabupaten Mamuju</b>	<b>-2,29</b>	<b>2,35</b>	<b>3,24</b>	<b>4,37</b>
<b>Kabupaten Pasangkayu</b>	<b>-2,73</b>	<b>3,78</b>	<b>-0,08</b>	<b>6,78</b>
<b>Kabupaten Mamuju Tengah</b>	<b>-1,02</b>	<b>3,26</b>	<b>2,30</b>	<b>2,80</b>

Catatan: \*Angka Sementara  
\*\*Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat

## 7. Bidang Keuangan Daerah dan Investasi

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terdapat perubahan yang signifikan terhadap manajemen pemerintahan di daerah, yaitu desentralisasi dipandang sebagai suatu usaha untuk melakukan reformasi dan revitalisasi baik ditingkat regional maupun ditingkat nasional. Salah satu dampak dari desentralisasi adalah adanya pengalihan tanggung jawab terhadap keuangan, administratif, pelayanan publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sehingga pertanggungjawaban atas pengelolaan potensi-potensi sumberdaya di daerah menjadi suatu hal yang sangat penting dilakukan oleh seorang kepala daerah. Adanya penekanan terhadap aspek pertanggungjawaban (akuntabilitas) lebih ditegaskan dengan dikeluarkannya paket perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

## 8. Sosial Budaya.

### a. Penduduk.

Penduduk Kabupaten Pasangkayu pada 2023 berdasarkan hasil proyeksi sensus penduduk tahun 2020 sebanyak 204.216 jiwa yang terdiri atas 105.810 jiwa penduduk laki-laki dan 98.406 jiwa penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pasangkayu pada 2023 sebesar 2,82 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap

penduduk perempuan di Kabupaten Pasangkayu tahun 2023 sebesar 107,5. Kepadatan penduduk di Kabupaten Pasangkayu tahun 2023 mencapai 67 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan Penduduk di 12 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Sarjo dengan kepadatan sebesar 249 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Dapurang sebesar 21 jiwa/ km<sup>2</sup>.

**Tabel 1.5**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2023 (Jiwa)**

<b>Kecamatan</b>	<b>Penduduk (Ribu)</b>	<b>Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020–2023 %</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Sarudu	17,2	2,82
Dapurang	19,1	2,83
Duripoku	7,1	3,17
Baras	24,4	2,63
Bulu Taba	13,0	2,89
Lariang	8,5	3,21
Pasangkayu	38,0	2,89
Tikke Raya	19,7	2,82
Pedongga	14,6	2,98
Bambalamotu	22,2	2,67
Bambaira	11,2	2,58
Sarjo	9,2	2,75
<b>Total</b>	<b>204,2</b>	<b>2,82</b>

**b. Tenaga Kerja**

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kabupaten Pasangkayu Pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi Kabupaten

Pasangkayu pada Tahun 2023 sebesar 631 pekerja. Pencari kerja di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2023 lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Terdapat 444 laki-laki dan 187 perempuan pencari kerja terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi Kabupaten Pasangkayu

**c. Kesehatan**

Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dapat dilihat pada beberapa aspek, seperti perkembangan sarana dan prasarana kesehatan. Keberadaan sarana kesehatan tersebut juga didukung oleh sejumlah tenaga kesehatan, yaitu 47 orang dokter, 359 bidan, dan 300 perawat. Salah satu strategi yang ditempuh dalam upaya menanggulangi pesatnya perkembangan jumlah penduduk adalah melalui program keluarga berencana. Keberhasilan dari program ini tidak terlepas dari partisipasi masyarakat Berdasarkan data Dinas PP dan KB Kabupaten Pasangkayu, pasangan usia subur di Pasangkayu pada tahun 2023 berjumlah 27.772 pasangan dengan 18.201 merupakan akseptor aktif. Jenis Kontrasepsi yang digunakan antara lain, Pil, IUD, Suntikan, Kondom, MOP/MOW, dan Implan.

**d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3(tiga) dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak. Menurut United Nation Development Programme (UNDP), pembangunan manusia dirumuskan sebagai upaya perluasan pilihan bagi penduduk (enlarging the

choices of people) dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut. “Perluasan pilihan” hanya mungkin dapat direalisasikan jika penduduk paling tidak memiliki: peluang berumur panjang dan sehat, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta peluang untuk merealisasikan pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan yang produktif. Dengan kata lain, tingkat pemenuhan ketiga unsur tersebut sudah dapat merefleksikan, secara minimal, tingkat keberhasilan pembangunan manusia suatu wilayah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR).

### **1.3. KEDUDUKAN, KEWENANGAN DAN TUGAS POKOK SERTA STRUKTUR ORGANISASI**

#### **1. Kedudukan**

Dengan diberlakukannya Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih menekankan aspek desentralisasi yang diberikan dalam terwujudnya otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

#### **2. Kewenangan dan Tugas Pokok**

##### **a. Kewenangan**

Dengan dimekarkannya Kabupaten Pasangkayu dari Kabupaten Induknya menjadikan Pasangkayu sebagai daerah otonomi, maka sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang– Undang No.32 Tahun 2004 kewenangannya mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan

fiskal, agama serta kewenangan lainnya yang meliputi kebijakan perencanaan nasional, pengendalian secara makro, perimbangan keuangan, sistem administrasi negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tinggi yang strategis serta konservasi dan standarisasi nasional. Kewenangan wajib sebagaimana disebut di atas meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja serta lain lain urusan seperti urusan pengembangan otonomi daerah, sosial, politik dalam negeri, olahraga, kependudukan, hukum dan perundang-undangan, penerangan, pertambangan dan energi, kelautan dan pariwisata.

#### **b. Tugas Pokok**

Pemerintah Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujud masyarakat Kabupaten Pasangkayu yang madani, sejahtera lahir dan batin berlandaskan iman dan taqwa.

### **3. Struktur Organisasi**

Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan dan mengoptimalkan pelayanan publik, pemerintah Kabupaten Mamuju Utara telah melakukan restrukturisasi organisasi perangkat daerah dengan mengacu pada arahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan pemerintah Kabupaten Mamuju Utara telah merivisi Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016. Upaya ini menunjukkan adanya keinginan kuat dari

pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk terus mendinamisasi organisasi perangkat daerahnya.

Saat ini, Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah;
2. Inspektorat Kabupaten;
3. Sekretariat DPRD;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
6. Badan Pendapatan Daerah;
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
11. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Dinas Ketahanan Pangan;
13. Dinas Lingkungan Hidup;
14. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
15. Dinas Kesehatan;
16. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
17. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
18. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
19. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan;
20. Dinas Pertanian;
21. Dinas Sosial;
22. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi;
23. Dinas Kelautan dan Perikanan;
24. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
25. Dinas Perhubungan;
26. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
27. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;



28. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
29. Satuan Polisi Pamong Praja;
30. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
31. Dinas Perkebunan dan Peternakan
32. Kecamatan (12)
33. Kelurahan (4).

# **BAB II**

## **PERENCANAAN KINERJA**



### **LAPORAN AKUNTABILITAS**

### **KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

### **TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU**

**TAHUN 2024**

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat antara lain mengenai visi, misi dan program Bupati yang terpilih selama 5 tahun masa pemerintahan, berdasarkan perencanaan stratejik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Penetapan indikator kinerja daerah (IKD) bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Proses ini menghasilkan suatu Rencana Stratejik Instansi Pemerintah, yang setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, dan program serta Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaannya.

Pemerintah Kabupaten Pasangkayu sebagai sektor publik dalam penyelenggaraan pemerintahan telah menyusun rencana strategis sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu No 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026.

#### 2.1 Indikator Kinerja Daerah Tahun 2023

Indikator Kinerja Daerah mencakup aspek pelayanan umum, yang terdiri atas layanan urusan wajib dasar, layanan urusan wajib non dasar, layanan urusan pilihan, dan layanan penunjang urusan. Dalam tngkatan kinerja, Indikator Kinerja Daerah berada pada level hasil (*outcome*) dan merefleksikan pencapaian kinerja program pembangunan daerah dan

program perangkat daerah.

Target indikator kinerja Daerah Kabupaten Pasangkayu tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 2.1.1**  
**Target Indikator Kinerja Daerah**  
**Pemerintah Kabupaten Pasangkayu**

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>			
1	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	Persen	22,50
2	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	Persen	94,41
3	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	Persen	41,50
4	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	26,50
5	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	80,03
6	Rasio Guru Murid PAUD	Rasio	15,01
7	Rasio Guru Murid Pendidikan Dasar	Rasio	23,1
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>			
8	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk	Rasio	3.919,70
9	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	Rasio	182,886,1
10	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Persen	70,70

11	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	75
12	Persentase puskesmas dengan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan	Persen	44,94
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>			
13	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	Persen	44,94
14	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Persen	4
15	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	Persen	6,5
16	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Yang Tidak Tersumbat	Persen	11,075 m (12,33%)
17	Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan	Persen	2
18	Luasan RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	Persen	128 (0,31)
19	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	Km	116,95
20	Jumlah Tukang Bersertifikasi	Orang	200
21	Persentase ketaatan Terhadap RTRW	Dokumen	1
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>			
22	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	Unit	500

23	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	Persen	5
24	Jumlah rumah layak huni yang tertangani	Unit	13
25	Cakupan luasan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Hektare	1ha
26	Persentase sengketa tanah Garapan yang terselesaikan	Persen	4
27	Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	65
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>			
28	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Kali	28
29	Persentase Warga Negara Yang Mendapatkan Layanan Perlindungan Terhadap Ancaman Bencana	Persen	100
30	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Dan Non Kebakaran Kabupaten/Kota	Kali	12
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>			
31	Persentase Penduduk Miskin Dan Anak Terlantar Yang Tertangani	Persen	91
32	Persentase PMKS Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Kabupaten/Kota	Persen	91
33	Persentase PMKS Yang Menerima Program Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Persen	91
34	Persentase Penduduk Miskin Dan Anak Terlantar Yang Tertangani	Persen	91

35	Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persen	91
36	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Persen	91
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>			
37	Jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh tenaga kerja	Unit	40
38	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	700
39	Jumlah Penyelesaian perselisihan (kasus)	Kasus	8
40	Jumlah kawasan/ wilayah pengemba ngan pemukiman transmigrasi (lokasi)	Lokasi	1
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>			
41	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	80
42	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	Persen	100
43	Cakupan Lembaga Penyedia Layanan Keluarga	Persen	3,51
44	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	Rasio	0.01
45	Laju pertumbuhan penduduk	Persen	3,08
46	Persentase peningkatan cakupan peserta ber KB	Persen	87

<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>			
47	Jumlah Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya yang Dibangun	Unit	3
48	Kualitas Konsumsi Pangan yang Diindikasikan Oleh Skor PPH	Persen	79
49	Persentase Penanganan Daerah Rentan Pangan	Persen	16,67
50	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan	Persen	100
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>			
51	Luas Lahan yang disiapkan untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	Ha	25
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>			
52	Persentase hasil kajian KLHS yang ditindaklanjuti	Persen	2
53	Luasan RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota / Perkotaan	Ha	1 Ha
54	Persentase lembaga kemasyarakatan yang mendapat pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup (KLP)	Lembaga	15
55	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	Persen	31
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>			
56	Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk	Rasio	0,72
57	Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio	0,94

58	Persentase OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan	Persen	14
59	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Cakupan	86
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>			
60	Persentase Desa Mandiri	Persen	3,51
61	Jumlah Temuan Inspektorat	Temuan	7
62	Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Yang Terlibat Dalam Kegiatan Pemberdayaan	Persen	12
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>			
63	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	50,50
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>			
64	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Berjalan Sesuai Standar	Persen	3.832
65	Persentase sarana dan prasarana pelayaran dalam kondisi baik	Persen	-
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>			
66	Indeks SPBE	Indeks	2,20
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>			
67	Persentase koperasi aktif yang mendapatkan pengawasan dan pemeriksaan	Persen	70

68	Persentase Ksp/Usp Koperasi yang berstatus sehat	Persen	50
69	Persentase Koperasi Aktif	Persen	70
70	Pertumbuhan Pendapatan Koperasi	Persen	15
71	Persentase UMKM Yang Meningkatkan Volume Usahanya Setelah Diberdayakan	Persen	70
72	Pertumbuhan Pendapatan UMKM	Persen	15
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>			
73	Jumlah Investor PMA Dan PMDN	Investor	2
74	Persentase publikasi investasi daerah	Persen	80
75	Jumlah izin yang diterbitkan	Izin	1.400
76	Persentase kenaikan jumlah realisasi PMDM/PMA	persen	88
77	Persentase Data Dan Informasi Yang Dimanfaatkan	Persen	60
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>			
78	Persentase Wirausaha Muda	Persen	34,63
79	Jumlah Prestasi Olahraga	Prestasi	7
80	Jumlah Prestasi Pramuka	Prestasi	-
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>			
81	Persentase Kompilasi Produk Statistik Sektoral yang Tersedia	Persen	21

<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>			
82	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persen	14
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>			
83	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan	Persen	100
84	Persentase Kesenian Tradisional yang Dikembangkan	Persen	100
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>			
85	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Orang	5.288
86	Persentasi SDM pengelola kearsipan yang tersertifikasi	Persen	12
87	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	9
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>			
88	Produksi Perikanan tangkap	Ton	8.555
89	Produksi Perikanan budidaya	Ton	8.098
90	Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB	Persen	7,57
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>			
91	Rata-Rata lama tinggal	Hari	2
92	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	141.800
93	Persentase SDM Pariwisata yang mendapat Pelatihan	Persen	85

94	Persentase Usaha Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Persen	85
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>			
95	Persentase kelompok tani yang terpenuhi kebutuhan sarana pertanian	Persen	5
96	Cakupan kelompok tani yang memperoleh penyuluhan	Kelompok	150
97	Cakupan kelompok tani yang terpenuhi kebutuhan prasarana pertanian	Kelompok	5
98	Persentase kelompok tani yang terpenuhi kebutuhan prasarana pertanian	Persen	10
99	Persentase ketersediaan sarana pertanian sesuai dengan peruntukan	Persen	10
100	Persentase hewan terkendali dari penyakit	Persen	242
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>			
101	Persentase usaha yang memiliki izin	Persen	60
102	Persentase usaha yang memiliki sertifikat SNI	Persen	30
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>			
103	Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Persen	29,50
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>			
104	Persentase pemenuhan fasilitas pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persen	98

105	Proporsi pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	Kegiatan	1.187
106	Terlaksananya program perekonomian dan pembangunan	Kegiatan	9
107	Persentase penataan inventarisasi bmd perangkat daerah yang sesuai ketentuan	Dok	3
108	Membaiknya tata kelola perbatasan	Kec./kel./desa	75
<b>SEKRETARIAT DPRD</b>			
109	Persentase Ranperda yang masuk dalam Prolegda dan menjadi Perda	Persen	100
<b>PERENCANAAN</b>			
110	Persentase Dokumen Perencanaan Yang Disusun Tepat Waktu	Dok	2
111	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100
<b>KEUANGAN</b>			
112	Persentase Penyerapan APBD	Persen	100
113	Persentase BMD Yang Dikelola	Persen	45
114	Persentase Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	5
<b>KEPEGAWAIAN</b>			
115	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	76

<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>			
116	Persentase ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	Persen	85
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>			
117	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Persen	20
<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>			
118	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	100
119	Persentase Maturitas SPIP Perangkat Daerah level 2 keatas	Laporan	25
<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>			
120	Persentase Penduduk Usia 16- 30 Tahun yang Mendapatkan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan	Persen	94
121	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dok	6
122	Jumlah partai politik dan lembaga pendidikan yang terlibat dalam pendidikan politik dan pengembangan etika	Partai	11
123	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan	Lembaga	6
124	Persentase lembaga ekonomi, sosial, dan budaya yang mendapatkan pembinaan	Persen	90
125	Persentase konflik sosial yang tertangani	Persen	60

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026

## 2.2 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) secara garis besar diklasifikasi kedalam dua aspek, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek daya saing daerah. Dalam tngkatan kinerja, IKU berada pada level dampak (*impact*) dan merefleksikan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Formulasi IKU disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi daerah dan isu-isu strategis daerah sebagai faktor penentu keberhasilan kinerja daerah. Sedangkan rumusan indikator kinerja program perangkat daerah disesuaikan dengan arah kebijakan untuk mencapai indikator kinerja utama dan pelayanan yang harus dilaksanakan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan capaian dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2021 - 2026 yang telah direncanakan, dimana tahun 2020 merupakan tahun dasar (*baseline*), tahun 2021 merupakan tahun awal RPJMD dan masih angka perkiraan dan tahun 2026 merupakan tahun akhir periode RPJMD. Seluruh indikator kinerja utama pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu untuk lima tahun ke depan dituangkan ke dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2.2.1**  
**Target Indikator Kinerja Utama**  
**Pemerintah Kabupaten Pasangkayu**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	68,31
2	Indeks Pendidikan	Indeks	72,28
3	Indeks Kesehatan	Indeks	62,30
4	Indeks Paritas Daya Beli	Indeks	75,00
5	Pendapatan Per Kapita	Rp Juta	62,00
6	Pertumbuhan ekonomi	Persen	6,35
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,75
8	Pengeluaran Per Kapita Sebulan	Rp	1.164.969
9	Indeks Gini	Indeks	0,308
10	Tingkat Kemiskinan	Persen	4,43
11	Indeks Infrastruktur	Indeks	74
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71,25
13	Indeks Kualitas Air	Indeks	50,30
14	Indeks Kualitas Udara	Indeks	92,58
15	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	67,78
16	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	52 (CC)
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	67,35
18	Opini BPK	Opini	WTP

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026

## 2.3 Isu-Isu Strategis

Permendagri 86/2017 mendefinisikan isu strategis sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil analisis kondisi umum daerah Kabupaten Pasangkayu, diidentifikasi sejumlah permasalahan pembangunan daerah yang perlu memperoleh penanganan sungguh-sungguh di masa depan dan berbagai isu-isu strategis daerah yang diyakini akan mempengaruhi pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Pasangkayu selama lima tahun mendatang. Permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah dimaksud dijelaskan secara terstruktur sebagai berikut:

### 1. Pengembangan Trans Sulawesi

Pulau Sulawesi dilihat sebagai wilayah dengan potensi sumberdaya alam yang melimpah. Dalam dokumen RPJMN 2020-2024, Pulau Sulawesi diarahkan untuk memperkuat peran Sulawesi sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia; pengembangan industri berbasis logistik; lumbung pangan nasional dengan pengembangan industri berbasis kakao, padi, jagung; pengembangan industri berbasis rotan, aspal, nikel, bijih besi dan gas bumi; percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari. Untuk mewujudkan semua itu, kebutuhan mendasar adalah infrastruktur.

Kondisi geografis yang didominasi oleh daratan membuat infrastruktur Pulau Sulawesi diprioritaskan pada infrastruktur darat. Salah satu proyek strategis infrastruktur nasional adalah

pembangunan jalur Trans Sulawesi. Proyek Trans Sulawesi adalah pembangunan jaringan jalur kereta api untuk menghubungkan daerah-daerah penting di Pulau Sulawesi. Proyek Trans-Sulawes ditargetkan mencapai panjang 2.000 Km dari Makassar ke Manado. Karena membutuhkan investasi besar, pembangunannya dilakukan secara bertahan, dimulai dari pembangunan jalur Makassar-Pare- pare, sementara tahap kedua dimulai di Parepare, Pinrang, Polman, Majene, Mamuju Utara, hingga Pasangkayu dengan panjang jalur sekitar 400 km. Jika proyek ini bisa direalisasikan, maka semua daerah-daerah yang selama ini menjadi pusat pertumbuhan di provinsi masing-masing bisa terkoneksi dengan baik. Konektivitas antar daerah di Pulau Sulawesi akan berdampak positif bagi pembangunan daerah Kabupaten Pasangkayu, salah satunya pada sektor pariwisata. Pembangunan Trans Sulawesi mempermudah orang untuk melakukan perjalanan karena jarak yang jauh dapat ditempuh dengan waktu singkat, sehingga memungkinkan wisatawan asing dan domestik menjangkau objek pariwisata di Kabupaten Pasangkayu. Sektor pertanian, terutama kelapa sawit dan kakao yang menjadi andalan Kabupaten Pasangkayu juga akan terkena dampak positif dari pembangunan Trans Sulawesi.

## 2. Keterbatasan Infrastruktur Wilayah

Posisi Pulau Sulawesi dalam kerangka pembangunan nasional cukup strategis karena berhadapan langsung dengan kawasan Asia Timur, khususnya Philipina yang menjadi salah satu lintasan perekonomian dunia. Dalam Rencana Strategis Pulau Sulawesi yang disusun oleh *Decentralization Support Facility* (DSF) tahun 2011 menyebut bahwa wilayah Pulau Sulawesi memiliki akses perdagangan paling strategis sebagai pusat pertumbuhan Kawasan Indonesia Timur dengan sumber daya alam cukup lengkap baik pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan pertambangan. Wilayah Pulau Sulawesi juga memiliki letak

geografis dan hubungan interaksi yang kuat dengan pulau Jawa sebagai pusat perekonomian di Indonesia.

Semua keunggulan geografis tersebut hanya bisa dimanfaatkan dengan baik jika didukung dengan ketersediaan infrastruktur wilayah. Infrastruktur wilayah penting bagi pembangunan Pulau Sulawesi karena memastikan konektivitas antar daerah, terutama daerah-daerah yang menjadi kantong-kantong pertumbuhan. Namun, saat ini Pulau Sulawesi masih berhadapan dengan tantangan keterbatasan infrastruktur darat, laut, dan udara. Paradigma pembangunan *trickle down effect* yang dipakai Orba menyebabkan pembangunan infrastruktur lebih dominan di Pulau Jawa. Itu sebabnya pembangunan ekonomi Kawasan Barat dan Timur masih timpang hingga saat ini. Pemerintah memang memutuskan untuk mendorong pembangunan infrastruktur di KTI, termasuk Pulau Sulawesi, tapi masih dalam tahap awal dan jika proyek pembangunan infrastruktur berhasil, untuk merasakan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi masih butuh waktu lama. Keterbatasan infrastruktur wilayah tersebut membuat perpindahan komoditas antar pulau dan mobilitas manusia masih sangat terbatas. Hal tersebut membuat pemanfaatan sumber daya alam di Kabupaten Pasangkayu (terutama sektor pertanian) masih belum mencapai titik optimalnya.

### 3. Stunting

Masalah *stunting* merupakan satu dari sekian prioritas pemerintah. Stunting melanda semua wilayah di Indonesia, termasuk Pulau Sulawesi. Lima provinsi di Pulau Sulawesi tahun 2018 memiliki persentase balita gizi buruk dan gizi kurang berdasarkan data Riskesdas Tahun 2018 yaitu Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat dan empat diantaranya memiliki angka persentase balita sangat pendek lebih tinggi dari nasional yaitu Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Sulawesi Barat. Provinsi

Sulawesi Barat memiliki 6,3 persen balita (0- 59 bulan) yang mengalami gizi buruk dan 18,4 persen balita mengalami gizi kurang, Sulawesi Tengah punya 4,8 persen balita gizi buruk dan 18,6 persen balita gizi kurang, Sulawesi Selatan 4,6 persen dan 18,4 persen, dan Gorontalo 6,8 persen dan 19,3 persen. Persentase balita gizi buruk dan gizi kurang di provinsi tersebut jauh lebih tinggi dari angka nasional yang persentase gizi buruknya hanya 3,9 persen dan gizi kurang 13,8 persen.

*Stunting* dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, sehingga pemerintah menetakannya sebagai salah satu prioritas dalam RPJMD 2020-2024. Untuk mempercepat penyelesaian *stunting*, pemerintah membentuk Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (TP2AK). TP2AK bersama beberapa kementerian menyusun dokumen Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) 2018-2024 sebagai panduan mendorong terjadinya kerjasama antar lembaga dan pemerintah daerah untuk memastikan konvergensi seluruh program/kegiatan terkait pencegahan anak kerdil daerah. Dengan kebijakan ini diharapkan bisa berdampak pada penurunan stunting, terutama di Kabupaten Pasangkayu melalui.

#### 4. **Pembangunan Manusia**

Pembangunan manusia syarat utama bagi Indonesia untuk mencapai tujuan jangka panjang menjadi negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Tujuan itu bisa saja tercapai mengingat dari sisi demografi semua daerah di Indonesia saat ini sedang memasuki fase bonus demografi, sebuah kondisi dimana struktur kependudukan didominasi oleh usia produktif. Salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Barat yang mengalami bonus demografi adalah Kabupaten Pasangkayu. Tak hanya dampak positif, bonus demografi juga berpotensi menjadi ancaman di masa depan jika tidak dimanfaatkan dengan baik.

Agar tidak menjadi masalah pembangunan nasional di masa depan, bonus demografi yang dinikmati semua daerah di Pulau Sulawesi harus dimanfaatkan dengan baik. Dalam dokumen RPJMD 2020-2024 salah satu strategi pengembangan wilayah di Pulau Sulawesi adalah peningkatan pelayanan dasar antara lain: (a) meningkatkan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja. Strategi tersebut bisa berdampak positif terhadap pembangunan manusia di Kabupaten Pasangkayu, terutama yang berkaitan dengan pendidikan vokasional pertanian, mengingat potensi pertanian khususnya komoditas perkebunan Kabupaten Pasangkayu yang saat ini masih membutuhkan keterlibatan SDM berkualitas.

## 2.4 Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026. Sehingga LAKIP Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021 merupakan pengukuran tahun pertama dari RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasangkayu 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran.

#### 2.4.1 Visi dan Misi Kabupaten Pasangkayu

Mencermati arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2005-2025, maka kerangka Visi pembangunan daerah Kabupaten Pasangkayu tahap ke-4 (Tahun 2021-2026) adalah :

**“Terwujudnya Masyarakat Pasangkayu yang Sejahtera, Maju, dan Bermartabat Berlandaskan Keberagaman”.**

Visi jangka menengah diatas disamping memiliki arah yang jelas, juga sangat kontekstual dan memiliki spektrum yang luas. Masyarakat Pasangkayu yang Sejahtera, Pasangkayu yang Maju, Pasangkayu yang Bermartabat, dan Berlandaskan keberagaman menjadi tema penting dalam wacana pembangunan daerah.

Usaha-usaha perwujudan visi pemerintah Kabupaten Pasangkayu tahun 2023 dijabarkan dalam 5 misi pembangunan Pasangkayu 2021-2026 sebagai berikut :

1. **Mewujudkan Sumberdaya Manusia Berkualitas.** Sumberdaya manusia berkualitas merupakan penggerak kemajuan dan menjadi jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih

sejahtera. Sedikitnya ada dua dimensi utama untuk mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas, yaitu Pendidikan dan Kesehatan.

2. **Memperkuat Struktur Ekonomi Produktif dan Berdaya Saing.** Struktur ekonomi yang kuat dengan aktivitas ekonomi yang produktif dan berdaya saing, memungkinkan masyarakat untuk menikmati taraf hidup dengan level yang tinggi.
3. **Mengakselerasi Pemerataan Pembangunan.** Manfaat dari pembangunan daerah hanya dapat dirasakan oleh seluruh kelompok penduduk jika pemerataan pembangunan terus diupayakan. Pelayanan dasar harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali.
4. **Mewujudkan Ruang dan Lingkungan yang Berkelanjutan.** Agar pembangunan daerah bisa berlangsung secara berkelanjutan, maka membutuhkan prasyarat berupa kualitas lingkungan hidup yang terjaga.
5. **Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bermartabat (Bersih, Efektif dan Terpercaya).** Pemerintahan yang baik dan bersih merupakan sebuah keniscayaan untuk hadirnya pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

#### 2.4.2 Tujuan dan Sasaran

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Pembangunan 5 tahun kedepan serta isu-isu strategis daerah Pasangkayu, maka tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, terwujudnya kemajuan daerah yang berdaya saing, dan bermartabatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah baik dan bersih.

Pembangunan daerah Kabupaten Pasangkayu selama periode 2021 - 2026 akan diarahkan pada pencapaian sejumlah indikator tujuan dan sasaran pokok. Indikator tujuan dan sasaran pokok dimaksud sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan daerah Kabupaten Pasangkayu adalah sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia
2. Indeks Pendidikan
3. Indeks Kesehatan
4. Indeks Paritas Daya Beli
5. Pendapatan Per Kapita
6. Pertumbuhan ekonomi
7. Tingkat Pengangguran Terbuka
8. Pengeluaran Per Kapita Sebulan
9. Indeks Gini
10. Tingkat Kemiskinan
11. Indeks Infrastruktur
12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
13. Indeks Kualitas Air
14. Indeks Kualitas Udara
15. Indeks Kualitas Lahan
16. Indeks Reformasi Birokrasi
17. Indeks Kepuasan Masyarakat
18. Opini BPK

**Tabel 2.4.2.1.**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
1.	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia	Membaiknya kinerja Pendidikan
		Membaiknya kinerja Kesehatan
		Membaiknya kinerja standar hidup
2.	Meningkatkan kinerja perekonomian daerah	Membaiknya struktur ekonomi daerah
		Meluasnya aktivitas ekonomi produktif
		Meningkatnya daya beli masyarakat
3.	Menciptakan pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat	Membaiknya taraf hidup masyarakat
		Membaiknya pemerataan infrastruktur
4.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Membaiknya kualitas air
		Membaiknya kualitas udara
		Membaiknya kualitas lahan
5.	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik serta pemerintahan yang bersih	Meningkatnya kepuasan publik atas layanan pemerintah
		Membaiknya pengelolaan keuangan daerah

## 2.5 Prioritas Pembangunan Tahun 2023

Dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, maka ada beberapa prioritas pembangunan untuk dilaksanakan pada tahun 2023, dalam menjawab isu-isu strategis yang diprediksikan akan berkembang dan mempengaruhi kinerja pembangunan Kabupaten Pasangkayu. Adapun prioritas pembangunan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan SPM Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan;
2. Pemenuhan SPM Pelayanan di Bidang Kesehatan;
3. Pemenuhan Hak dan Kualitas Kebutuhan Dsar Keluarga Melalui Pengembangan Usaha Industri Rumahan;
4. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dari Berbasis Komunitas Menjadi Lokomotif Pembangunan Ekonomi;
5. Pemenuhan Akses Penduduk Terutama Usaha Kecil dan Menengah Terhadap Sumberdaya Produktif;
6. Percepatan Adopsi Inovasi Teknologi Budidaya dan Pascapanen Untuk Peningkatan Skala Produksi;
7. Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan;
8. Pembangunan Infrastruktur Jalan Jembatan, irigasi, serta permukiman dan Perumahan Serta Intrastruktur Digital;
9. Penerapan Konservasi, Monitoring, dan Pencegahan Terhadap Pencemaran Air Permukaan dan Air Tanah;
10. Penerapan Konservasi, Monitoring, dan Pencegahan Terhadap Pencemaran Udara;
11. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lahan;
12. Penguatan Kapasitas Teknologi, Sarana, Fasilitas dan SDM Untuk Sistem Pelayanan Publik Yang Prima;
13. Penataan kelembagaan dan Organisasi Serta Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Sumber Daya Aparatur Pengelola Keuangan.

## 2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi dilingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Penetapan Kinerja Kabupaten Pasangkayu tahun 2023 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023.

## 2.7 Kebijakan Pembangunan Tahun 2023

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Pemerintah Kabupaten Pasangkayu mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan.

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran.

Adapun penjelasan lebih rinci kebijakan dan program untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

### **1. Membaiknya Kinerja Pendidikan**

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Pendidikan;
3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan;
4. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
5. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
6. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.

### **2. Membaiknya Kinerja Kesehatan**

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

### **3. Membaiknya Kinerja Standar Hidup**

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui program:

1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan;

2. Program Perlindungan Perempuan;
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
4. Program Pemenuhan Hak Anak;
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya.

#### **4. Membaiknya Struktur Ekonomi Daerah**

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
4. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan;
5. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian;
6. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
7. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri;
8. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
9. Program Pemasaran Pariwisata.

#### **5. Meluasnya Aktifitas Ekonomi Produktif**

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui program :

1. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi;
2. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian;
3. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi;
4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk);
5. Program Pengembangan Umkm;
6. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
7. Program Promosi Penanaman Modal;
8. Program Pelayanan Penanaman Modal;
9. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
10. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;

11. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
12. Program Pengembangan Kebudayaan;
13. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
14. Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
15. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
16. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
17. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.

#### **6. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat**

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui program :

1. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

#### **7. Membaiknya Taraf Hidup Masyarakat**

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui program :

1. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
2. Program Pemberdayaan Sosial;
3. Program Rehabilitasi Sosial;
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
5. Program Penanganan Bencana;
6. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
7. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
8. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera;
9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

## **8. Membaiknya Pemerataan Infrastruktur**

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui program :

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
2. Program Penataan Bangunan Gedung;
3. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
4. Program Penyelenggaraan Jalan;
5. Program Penanggulangan Bencana;
6. Program Pengelolaan Pelayaran;
7. Program Kawasan Permukiman;
8. Program Pengembangan Perumahan;
9. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi.

## **9. Membaiknya Kualitas Air**

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
5. Program Pengelolaan Persampahan.

## **10. Membaiknya Kualitas Udara**

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
3. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

## **11. Membaiknya Kualitas Lahan**

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui program :

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
3. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI).

## **12. Meningkatnya Kepuasan Publik Atas Layanan Pemerintah**

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
3. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD;
4. Program Kepegawaian Daerah;
5. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
6. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
7. Program Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
8. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
10. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
11. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi;
12. Program Pembinaan Perpustakaan;
13. Program Administrasi Umum;
14. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
15. Program Pendaftaran Penduduk;
16. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
17. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
18. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;

19. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
20. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

### **13. Membaiknya Pengelolaan Keuangan Daerah.**

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
5. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
6. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;
7. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
8. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;
9. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
10. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi.

# **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**



## **LAPORAN AKUNTABILITAS**

## **KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

## **TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU**

**TAHUN 2024**

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah memerlukan pertanggungjawaban yang merupakan perwujudan komitmen pemerintah daerah untuk bersikap transparan dengan mengungkapkan pelaksanaan mandat/amanah yang telah diterimanya. Konsep akuntabilitas adalah salah satu jawaban untuk maksud dari pertanggungjawaban tersebut.

Kinerja keuangan masa lalu dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan daerah, baik pendapatan yang bersumber dari internal maupun eksternal pemerintah daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah, sehingga analisis pengelolaan keuangan daerah menjelaskan tentang aspek kebijakan keuangan daerah.

#### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023**

Sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas sebagai amanah pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN /05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan kurun waktu periode tahun 2021-2026 melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan LAKIP ini

didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan rencana strategik instansi pemerintah yang mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, dan program serta Indikator Kinerja Utama perencanaan Strategik dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2023.

**Tabel 3.1**  
**Tingkat Capaian Indikator Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah**  
**Tahun 2023 Kabupaten Pasangkayu.**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
<b>I</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>				
1	Rata-rata lama sekolah	Jiwa	9,30 (tahun)	8,12 (Tahun)	87
2	Angka harapan sekolah	Jiwa	12 (tahun)	12,07 (Tahun)	100
3	APS SD	Persen	99,76%	96,13%	96
4	APS, SMP	Persen	90,03%	63,04%	70
5	Angka partisipasi murni SD/MI	Persen	100 %	96,18%	96
6	Angka partisipasi murni SMP/MTs	Persen	100 %	76,17%	76
7	Angka partisipasi kasar SD/MI	Persen	100 %	97,75%	98
8	Angka partisipasi kasar SMP/MTs	Persen	100 %	103,38%	103
9	Jumlah Ruang Kelas Yang Terbangun	Ruangan	1.362 Ruangan	16 Ruangan	1

10	Persentase kompetensi keahlian guru	Persen	0,52 %	8,56%	165
11	Jumlah organisasi dan kegiatan kepemudaan	Organisasi	15	8	53
12	Ketersediaan stadion olahraga	Stadion	1 stadion	1	100
13	Jumlah gedung sekolah SD/MI kondisi baik	Gedung	500 rkb	1087	216
14	Jumlah gedung sekolah SMP/MTs kondisi baik	Gedung	500 rkb	376	75
<b>II</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>				
15	Indeks Kesehatan	Indeks	63	-	-
16	Angka kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Persen	205	230	112
17	Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	Persen	18,6	16	86
18	Persentase Bayi baru lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar sampai dengan 100%	Persen	91	63,87	70
19	Menurunnya Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita 17%	Persen		9,86	100
20	Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 0-11 bulan	Persen	85	53,6	63
21	Meningkatnya Balita kurus (wasting) yang mendapat makanan tambahan	Persen	75	69,52	97

	sampai dengan 90%				
22	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6- 24 bulan pada keluarga miskin sampai dengan 100%	Persen	-	-	-
23	Cakupan gizi buruk yang mendapat perawatan sampai dengan 100%	Persen	100	100	100
24	Persentase Usia Bawah lima Tahun (Balita) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar sampai 100	Persen	75	68	91
25	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar 100%	Persen	90	61,30	68
26	Meningkatnya cakupan kunjungan Neonatal pertama (KN1) sampai dengan 90%	Persen	90	100	111
27	Cakupan kunjungan ibu hamil (K4) sampai dengan 95%	Persen	90	49,06	55
28	Cakupan ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapat makanan tambahan minimal 95	Persen	13	71,43	549

29	Persentase Ibu bersalin dan Nipas Mendapatkan Pelayanan Persalinan dan Nifas Sesuai Standar di Puskesmas dan Jaringannya sampai dengan 100%	Persen	90	55	61
30	Persentase terduga Tuberkulosis mendapatkan Pemeriksaan Tuberkulosis Sesuai Standar sampai dengan 100%	Persen	65	100	154
31	Menurunnya Annual Paracite Index (API)	Persen	1<	0,11	909
32	Persentase Insiden Rate DBD < 49 per 100.000 penduduk	Persen		154	100
33	Cakupan tatalaksana kasus/penyakit diare, tifoid, frambusia, ISPA, pneumonia sampai dengan 100%	Persen	90	93,4	104
34	Persentase tatalaksana kasus gigitan potensi Rabies sampai dengan 100%	Persen	-	-	-
35	Persentase Terduga HIV dan AIDS Mendapatkan Pemeriksaan HIV - AIDS Sesuai Standar sampai	Persen	100	56,04	56

	dengan 100%				
36	Persentase satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus Mendapatkan Promosi Kesehatan sampai dengan 100%	Persen	70	100	143
37	Persentase Puskesmas Pembantu Melaksanakan Promosi Kesehatan sampai dengan 100%	Persen	60	100	167
38	Persentase Promosi untuk Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan sampai dengan 100%	Persen	60	100	167
39	Persentase pasar rakyat Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Lingkungan sampai dengan 100%	Persen	-	-	-
40	Persentase satuan Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Lingkungan sampai dengan 100%	Persen	100	-	-
41	Persentase Respons Verifikasi terhadap SKDR dalam Waktu Kurang dari 24 Jam sampai dengan 100%	Persen	100	100	100

42	Rasio tenaga dokter per 2.200 penduduk	Persen	-	35,7	100
43	Rasio Poskesdes per desa (1:1)	Persen		0,139	100
44	Cakupan kecamatan yang memiliki minimal 1 (satu) Puskesmas yang terakreditasi	Persen	90	100	111
45	Persentase siswa satuan Pendidikan Dasar Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar sampai dengan 100%	Persen	90	48	53
46	Persentase Usia 15 -59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai standar s/d 100%	Persen	90	34,8	39
47	Persentase Usia 20 -59 tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Sesuai Standar sampai dengan 100%	Persen	100	-	-
48	Persentase Usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar sampai dengan 100%	Persen	85	38,67	45
<b>III</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>				

49	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	Persen	44.94	46.59	104
50	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Persen	4	70.8	1770
51	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	Persen	6.5	59.52	916
52	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air yang Tidak Tersumbat	Persen	60	64	107
53	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	Km	136	214.55	158
54	Jumlah Tukang Bersertifikasi	Orang	200	200	100
<b>IV</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>				
55	Proporsi pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	98	98
56	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Unit	500	-	-
57	Terwujudnya izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman kumuh	Dokumen	2	-	-
58	Fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan	dokumen	4	3	75
<b>V</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN</b>				
59	Presentase pemenuhan kebutuhan perangkat	Persen	94	97.89	104

	daerah				
60	Presentase perumusan kebijakan teknis bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan non kebakaran dan penyelamatan	persen	90-100	100	100
61	Persentase pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persen	90-100	23.12	27
62	Persentase pengembangan dan pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan pemberdayaan masyarakat.	persen	90-100	45.45	50
<b>VI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>					
63	Jumlah sarana sosial	Unit	6	1	17
64	Persentase PMKS yang menerima bantuan	Persen	100	94,60	95
65	Peningkatan Kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial, pembedayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Desa	63	63	100

66	Terpenuhinya Kebutuhan Kesehatan Pendidikan RTSM/KS	KPM	4.536	4.932	109
67	Terlaksananya pemberian bantuan kepada masyarakat miskin	RTM	1.000	4.932	493
68	Terwujudnya keserasian sosial	Kecamatan	3	-	-
<b>VII</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>				
69	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	75.54	50.08	66
70	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	2.24	2.02	111
71	Transmigrasi umum yang ditempatkan	persen	16.67	5.00	30
<b>VIII</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>				
72	Kualitas Konsumsi Pangan yang Diindikasikan Oleh Skor PPH	Poin	79	80,2	102
73	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan pangan	Persen	100	100	100
74	Ketersediaan Pangan Utama	Persen	2600	3068	118
75	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Aman	Persen	100	100	100

	Dikonsumsi				
<b>IX</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN</b>				
76	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persen	80,00	82,35	103
<b>X</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>				
77	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71.25	76,44	107
78	Indeks Kualitas Air	Indeks	50,20	60.27	120
79	Indeks Kualitas Udara	Indeks	92,58	96.51	104
80	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	67.78	67.08	99
81	Persentase Hasil Kajian KLHS yang ditindaklanjuti	Dok	1	2	200
82	Luasan RTH Publik Sebesar 20 % dari luas Wilayah Kota/Perkotaan	Ha	2 Ha	2 Ha	100
83	Persentase Lembaga	Lemba	15	-	-

	Kemasyarakatan yang mendapat pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Lingkungan Hidup (KLP)	ga			
84	Persentase Jumlah Sampah yang tertangani	Persen	30	54,5	182
<b>XI</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>				
85	Rasio penduduk ber-KTP persetujuan penduduk	Rasio	0.72	0.80	111
86	Rasio bayi berakta kelahiran	Rasio	0.94	0.87	89
87	Rasio pasangan berakta menikah	Rasio	1.00	1.00	100
88	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persen	100	100	100
89	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	Persen	88	80	100
90	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan	OPD	14	4	28
<b>XII</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>				
91	Persentase desa mandiri	Persen	94	80	89

92	Jumlah temuan inspektorat	Persen	50	60	80
93	Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan	lembaga	9	9	100
94	Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	LPM	77	77	100
95	Jumlah desa yang dievaluasi dan meningkat kualitasnya	Desa	40	40	100
96	Jumlah kelompok ekonomi desa (Mandiri ekonomi)	Desa	12	12	100
97	Jumlah posyandu purnama	Unit	266	266	100
98	Jumlah PKK aktif	Klp	94	94	100
<b>XIII</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>				
99	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Berjalan Sesuai Standar	Angka	276	256	93
100	Persentase sarana dan prasarana pelayaran dalam kondisi baik	Angka	2	2	100
<b>XIV</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				
101	Indeks SPBE	Persen	2,20	1,79	81
102	Persentase Kompilasi	Persen	95	-	-

	Produk Statistik Sektoral yang Tersedia				
103	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persen	80	-	-
104	Terwujudnya penyebaran informasi pemerintah daerah	Media	48	30	61
105	Tersebarnya informasi pemerintah daerah melalui media Website	Bulan	12	12	100
<b>XV</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>				
106	Meningkatnya presentase koperasi aktif	persen	40,43	35,04	87
107	Menurunnya presentase peredaran barang kadaluarsa, palsu dan ilegal	persen	5	7	140
108	Jumlah pasar yang dipelihara	unit	14	-	-
<b>XVI</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 1 PINTU</b>				
109	Jumlah Investor/ Penanam Modal Dalam Negeri	Perusahaan	1500	4197	280
110	Jumlah Investor/ Penanam Modal Asing	Perusahaan	1	1	100

111	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Persentase	60	2,90	5
112	Jumlah Nilai Realisasi Investasi	Rupiah	150	574	383
113	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan	Izin	1,400	3,777	270
114	Rata-rata Lama Proses Peizinan	Hari/Ke rja	7	7	100
115	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Kualitas Pelayanan	Persen	80,20	90,79	113
116	Jumlah Aplikasi Peizinan dan Non Perizinan yang Mendukung Kinerja DPMPTSP	Aplikasi	1	4	400
<b>XVII</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA</b>				
117	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan	Persen	100	100	100
118	Persentase Kesenian Tradisional yang Dikembangkan	Persen	100	90	90
119	Rata-Rata Lama Tinggal	Hari	2	2	100
120	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	713,304	713,304	100
121	Persentase SDM Pariwisata yang Mendapat Pelatihan	Persen	100	100	100
122	Persentase Usaha Ekonomi Kreatif yang	Persen	100	100	100

	Dikembangkan				
123	Jumlah Desa Wisata	Desa	5	5	100
124	Jumlah Grup Kesenian Budaya	Grup	30	-	-
125	Pengembangan Sarana dan Prasarana Tujuan Wisata	Buah	15	8	53
<b>XVIII</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>				
126	Jumlah Pengunjung Perpustakaan PerTahun	Orang	5.288	581	11
127	Jumlah perangkat daerah yang mengelola asrip secara baku	Perangkat Daerah	9	32	355
128	Jumlah SDM pengelola kearsipan yang tersertifikasi	Orang	12	2	17
<b>XIX</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				
129	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap	Ton	9855	8500,526	86
130	Pertumbuhan produksi perikanan budidaya	Ton	8098	9110,88	113
131	Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB	Persen	7,57	-	-
<b>XX</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>				
132	Tingkat produktivitas padi per-hektar	Ton	8760.17	5 Ton/ha	0.1
133	Jumlah kelompok tani memperoleh modal usaha	Kelompok	-	-	-
134	Jumlah	Orang	-	-	-

	masyarakat/kelompok tani menggunakan teknologi				
135	Pembangunan jalan pertanian	Km	8750 M	-	-
136	Pembangunan kelompok tani yang tersusun	Kelompok	-	150 klp	150
<b>XXI</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA</b>				
137	Terwujudnya Penanggulangan Bencana yang Handal, Efektif dan Efisien	Persen	100	100	100
138	Jumlah SDM/masyarakat yang mengikuti sosialisasi/ pelatihan penanggulangan bencana	orang	-	200	-
139	Persentase Kejadian Bencana yang Tertangani	Persen	100	100	100
140	Persentase Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang Terlaksana	Persen	100	100	100
<b>XXII</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>				
141	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD	Skor	3,00	2,38	79
142	Penilaian Pelayanan Publik Ombudsman (Zona)	Nilai	Zona Hijau	Zona Kuning	77,77

143	Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu	Dokumen	CC	CC	100,76
144	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu	Dokumen	B	CC	100
145	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kegiatan	1200 Peserta	1200 Peserta	100
146	Terlaksananya Pembinaan Desa Sadar Hukum di Kecamatan	Kegiatan	24 Desa dalam 12 Kecamatan	24 Desa dalam 12 Kecamatan	100
147	Jumlah Bantuan Sosial (Hibah) Kepada Lembaga Keagamaan	Dokumen/Proposal	84	81	96
148	Jumlah Masyarakat yang difasilitasi Mengikuti Kegiatan Keagamaan	Orang	11	9	82
149	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Keagamaan (MTQ dan STQ)	Orang	240	143	60
150	Jumlah Kontrak/MOU Kerjasama yang dibuat	Dokumen	18	18	100

151	Jumlah Kajian Kelayakan Ekonomi, Analisis Pasar dan Pemasaran BUMD	Dokumen	1	1	100
152	Jumlah Dokumen Berupa Buku dan CD Standar Satuan Harga (SSH)	Dokumen dan CD	2	2	100
<b>XXIII SEKRETARIAT DPRD</b>					
153	Jumlah Perda yang ditetapkan	Perda	9	4	44,44 %
154	Jumlah produk dokumentasi, publikasi dan informasi DPRD yang disebarluaskan	Media	39	39	100,00 %
<b>XXIV PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN</b>					
155	Persentase Dokumen Perencanaan Yang Disusun Tepat Waktu	Persen	2	2	100
156	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RPJMD	Persen	100	100	100
157	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang ditindak Lanjuti	Persen	20	20	100
158	Persentase Pemenuhan Kebutuhan perangkat daerah	Persen	92	92	100
<b>XXV KEUANGAN</b>					
159	Opini BPK	Opini	WTP	-	-

160	Persentase Penyerapan APBD	Persen	100	95,43	95
161	Proporsi Laporan Keuangan dan Laporan Aset Daerah yang Tersampaikan Tepat Waktu	Persen	100	100	100
<b>XXVI</b>	<b>KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>				
162	Indeks profesionalitas ASN	Persen	76	54.76	72
163	Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan	persen	85	95.85	113
<b>XXVII</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>				
164	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	orang	10	12	120
165	Terselenggaranya pemantauan tindak lanjut hasil temuan dan Pengaduan masyarakat	Laporan	205	215	105
166	Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP	Perangkat Daerah	Level 3	Level 3	100
167	Menciptakan Sistem AKIP yang efektif	Perangkat Daerah	C	C	100
168	meningkatnya kapabilitas	Rekome	Level 3	Level 3	100

	Aparat pengawasan Intern pemerintah Secara mandiri (Self improvement)	ndasi			
<b>XXVIII</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>				
169	Persentase Penduduk Usia 16-30 Tahun yang mendapatkan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan	Persen	94	70	74
170	Persentase Lembaga ekonomi, social dan Budaya yang mendapatkan pembinaan	Persen	90	80	89
171	Jumlah Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang terlibat dalam pendidikan politik dan pengembangan etika	Partai	11	11	100
172	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan	Lemba ga	4	3	75
173	Persentase Konflik social yang tertangani	Persen	40	71	177
174	Persentase Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang	Persen	80	80	100

	dilaksanakan				
<b>XXIX</b>	<b>URUSAN PENDAPATAN DAERAH</b>				
175	Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	5,00	7,25	145
<b>XXX</b>	<b>URUSAN PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN</b>				
176	Panjang Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan	Km	228 Km	12,137 Km	5
177	Jumlah Bantuan Pupuk	Kg	500.000 Kg	-	-
178	Jumlah Bantuan Bibit Kakao Sambung Pucuk	Pohon	40.750 Pohon	-	-
179	Jumlah Ternak Yang Diinseminasi Buatan	Ekor	773 Ekor	-	-
180	Jumlah Kelahiran Ternak Yang di Inseminasi	Ekor	481 Ekor	-	-
<b>XXXI</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>				
181	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	50,50	60,15	119
182	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	Persen	100	25	25

183	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	Rasio	0	0,02	2
184	Persentase Peningkatan Cakupan Peserta ber KB	Persen	48,1	65,54	136

Berdasarkan tabel Indikator Kinerja Daerah di atas, tergambar dari 184 (seratus delapan puluh empat) Indikator Kinerja tersebut 101 Indikator Kinerja berhasil dicapai sesuai dengan target, sedangkan 55 Indikator Kinerja tidak mencapai target namun persentase masih diatas rata-rata 60%.

Terhadap berbagai target capaian yang hampir mencapai target akan terus diupayakan dan yang belum atau di bawah target yang diinginkan, **Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu** akan melakukan berbagai langkah evaluasi sebagai upaya perbaikan. Dalam menjelaskan capaian yang telah dilakukan tersebut, dijabarkan dalam Capaian Kinerja Organisasi dengan dikaitkan dengan sasaran strategisnya.

Dari tabel diatas, dapat diperoleh gambaran bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Pasangkayu telah dapat melaksanakan tugas yang diamanatkan walaupun dari sasaran yang telah ditetapkan masih terdapat beberapa target indikator yang belum menunjukkan kinerja sebagaimana yang diharapkan pada tahun 2023 ini. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasangkayu telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi untuk perbaikan dimasa mendatang.

### 3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, khususnya terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dominan pada tiap-tiap sasaran strategis. Analisis juga dilakukan terhadap IKU yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja sasaran namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran strategis. Selain itu, analisis dilakukan dengan membandingkan capaian 2022 dengan capaian 2023.

**MISI 1: "MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS"**

Untuk misi "Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas" bertujuan untuk Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja dapat diuraikan pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.2.1**  
**Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Sasaran : Membaiknya Kinerja Pendidikan**

No	Indikator	Target (2023)	Realisasi Tahun		Capaian
			2022	2023	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,27	68,03	70,42	100
2	Indeks Pendidikan	71,88	-	-	-
3	Rata-rata lama sekolah	9,30 (tahun)	8,11 (Tahun)	8,12 (Tahun)	87
4	Angka harapan sekolah	12 (tahun)	12,06 (Tahun)	12,07 (Tahun)	100
5	APS SD	99,76%	98,65%	96,13%	96
6	APS, SMP	90,03%	94,21%	63,04%	70
7	Angka partisipasi murni SD/MI	100 %	83,82%	96,18%	96
8	Angka partisipasi murni SMP/MTs	100 %	85,98%	76,17%	76
9	Angka partisipasi kasar SD/MI	100 %	90,55%	97,75%	98
10	Angka partisipasi kasar SMP/MTs	100 %	98,34%	103,38%	103

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian target kinerja tahun 2023 untuk sasaran **Membaiknya Kinerja Pendidikan** cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat indikator cukup meningkat dari tahun sebelumnya walaupun tidak dipungkiri masih ada bagian dari indikator yang belum maksimal. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak. Pada tahun 2023, jumlah penduduk di Kabupaten Pasangkayu adalah 199.140 jiwa. Nilai ini berada pada peringkat ketiga setelah Kabupaten Polewali Mandar dan Mamuju. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2023 berada pada peringkat pertama terendah se- Provinsi Sulawesi Barat, yaitu sebesar 8,94 ribu . Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2023 adalah sebesar 70,42.
2. Indeks Pendidikan pada tahun 2023 belum diukur oleh Perangkat Daerah terkait.
3. Rata-rata Lama Sekolah belum mencapai target yang diharapkan, hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan (menyekolahkan anak), serta masih terdapatnya anak sekolah dari suku dalam (suku terasing) yang lebih mengarahkan anaknya untuk bekerja dari pada sekolah. Pemerintah melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga telah menjalankan program Retrival dan Transisi, yang merupakan program mengembalikan anak putus sekolah yang masih dalam usia sekolah dengan memberikan bantuan beasiswa dan bantuan transisi bagi siswa yang terancam putus sekolah karena persoalan

ekonomi.

4. Angka Harapan Sekolah dari tahun ketahun terus terus meningkat dan diupayakan untuk mencapai target yang diinginkan. Namun masih ada beberapa faktor yang menjadi kendala diantaranya terbatasnya dana untuk biaya pendidikan anak dan di beberapa tempat belum tersedianya layanan pendidikan khususnya SMA.
5. APS, SD pada tahun 2022 dan 2023 sudah terealisasi sebesar 98,65% dan 96,13% dari target yang diinginkan sebesar 99,76%, namun pada tahun 2023 ada sedikit penurunan realisasi yaitu sebesar 96,13%, hal ini disebabkan adanya keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan termasuk keterbatasan jumlah tenaga pendidik dan banyaknya siswa yang lanjut ke Pesantren pada saat Pandemi.
6. APS, SMP pada tahun 2022 dan 2023 sudah terealisasi sebesar 94,21% dan 63,04% dari target yang diinginkan sebesar 90,03%, terkait Angka Partisipasi Sekolah jenjang SMP mengalami peningkatan target di tahun 2022, namun di tahun 2023 mengalami penurunan disebabkan banyaknya siswa yang lanjut ke Pesantren pada saat Pandemi, namun jika melihat angka capaian sudah menghampiri target yang telah ditetapkan.
7. Angka Partisipasi Murni SD/MI pada tahun 2022 dan 2023 terealisasi sebesar 83,82% dan 96,18% dari target yang diinginkan yaitu 100%, Pada tahun 2023 mengalami peningkatan yaitu sebesar 96,18%. Hal ini dipengaruhi oleh naiknya angka usia anak sekolah tingkat SD dan terjadinya penurunan mutasi/perpindahan siswa keluar daerah.
8. Angka Partisipasi Murni SMP/MTS pada tahun 2022 dan 2023 terealisasi sebesar 85,98% dan 76,17% dari target yang diinginkan yaitu 100%, dan pada tahun 2023 mengalami penurunan yang begitu signifikan dari tahun sebelumnya (2020), hal ini dipengaruhi oleh menurunnya angka usia anak sekolah tingkat SMP.
9. Angka Partisipasi Kasar SD/MI telah mencapai target yang

diinginkan. Hal ini tidak lepas dari upaya memberi kesadaran masyarakat khususnya yang masuk kedalam kelompok golongan Angka Partisipasi Kasar Tingkat SD/MI untuk menyekolahkan anak-anaknya. Di tahun 2022 Angka Partisipasi Kasar SD/MI sebesar 90,55% namun di tahun 2023 mengalami penurunan pada angka 97,75%.

10. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs pada tahun 2022 sudah hampir tercapai 98,34% dari target yang diinginkan yaitu 100%, namun pada tahun 2023 mengalami kenaikan signifikan yaitu sebesar 103,38%.

Terlepas dari capaian diatas pemerintah daerah yang terus akan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan yang merata, serta akses pelayanan pendidikan. Keberhasilan kebijakan ini akan berdampak besar terhadap peningkatan pendidikan masyarakat yang baik di Kabupaten Pasangkayu yang pada gilirannya akan memberi dampak positif pada pencapaian target akhir masa berlakunya RPJMD yakni tahun 2026

**Tabel 3.2.2**  
**Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Sasaran : Membaiknya Kinerja Kesehatan**

No	Indikator	Target (2023)	Realisasi Tahun		Capaian
			2022	2023	
1	Indeks Kesehatan	63,16	-	-	-
2	Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	18,6	19	16	86
3	Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup	11,6	15	13,49	116
4	Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	75	94,28	68	91
5	Prevalensi anak balita yang Pendek (stunting)	18,4	22,59	21,62	117

6	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6- 24 bulan pada keluarga miskin sampai dengan 100%	100	33,5	33,19	33
8	prevalensi wasting(gizi kurang dan gizi buruk)	7,5	6,67	9,86	131
9	Angka kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	205	217	230	112
10	Persentase Terduga HIV dan AIDS Mendapatkan Pemeriksaan HIV - AIDS Sesuai Standar sampai dengan 100%	100	65,33	56,04	56

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian target kinerja tahun 2023 untuk sasaran **Membaiknya Kinerja Kesehatan** cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat indikator cukup meningkat dari tahun sebelumnya walaupun tidak dipungkiri masih ada bagian dari indikator yang belum maksimal. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 1. Indeks Kesehatan

kumpulan indikator kesehatan yang dapat dengan mudah dan langsung diukur untuk menggambarkan masalah kesehatan. Serangkaian indikator kesehatan ini secara langsung maupun tidak langsung dapat berperan meningkatkan umur harapan hidup yang panjang dan sehat.Salah satu komponen dari indeks pembangunan manusia adalah indeks Kesehatan.indeks Kesehatan merupakan konversi angka harapan hidup.angka harapan hidup pada dasarnya

merupakan gambaran kondisi suatu wilayah secara garis besar, semakin tingginya angka harapan hidup menandakan adanya perbaikan status Kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan

## 2. Menurunkan Angka Kematian Anak

Indikator angka kematian yang berhubungan dengan anak yakni Angka Kematian Neonatal (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA). Perhatian terhadap upaya penurunan angka kematian neonatal (umur 0-28 hari) menjadi penting karena kematian neonatal memberi kontribusi terhadap kematian bayi., Angka Kematian Neonatus (AKN) pada tahun 2012 sebesar 19 kematian per 1.000 kelahiran hidup, sama dengan AKN berdasarkan SKDI tahun 2007. Angka Kematian Bayi (AKB) terus turun, yaitu 68 per 1.000 kelahiran hidup pada SKDI tahun 1991 turun hingga 32 per 1.000 kelahiran hidup pada SKDI 2012. Demikian pula dengan Angka Kematian Balita (AKABA) memiliki tren penurunan, yaitu 97 per 1.000 kelahiran hidup pada SKDI tahun 1991 turun menjadi 40 per 1.000 kelahiran hidup pada SKDI 2012.

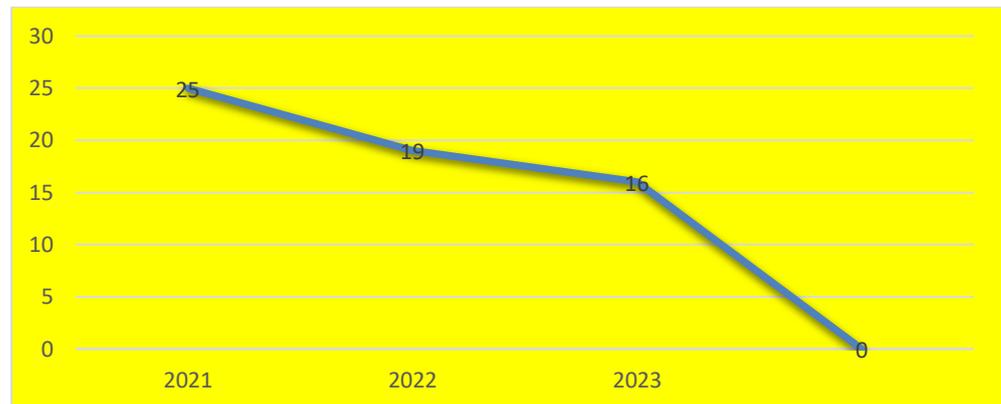
Angka Kematian Bayi menunjukkan keberhasilan pelayanan kesehatan suatu wilayah. Di Kabupaten pasangkayu Angka kematian bayi (AKB) mencapai 16 per 1.000 kelahiran hidup lebih tinggi dari target adalah sebesar  $< 12$  per 1.000 kelahiran hidup. Tetapi mengalami kenaikan dari kejadian tahun 2022 sebesar 19 per 1.000 kelahiran hidup. Kenaikan angka kematian bayi dikarenakan kondisi bayi yang diawali dengan perawatan ibu pada masa hamil yang belum optimal juga di mungkinkan karena kondisi risiko / komplikasi dari ibunya yang menyebabkan bayi dilahirkan dalam kondisi berrisiko dan menjadikan peluang meninggal.

Adapun faktor penghambat dalam menekan angka kematian pada bayi disebabkan

1. Terlambat mengambil keputusan

2. Terlambat mencapai rumah sakit rujukan, dan
3. Terlambat mendapat pertolongan adekuat di Rs rujukan.

### Angka Kematian Bayi Tahun . 2021 – 2023 di Kabupaten Pasangkayu



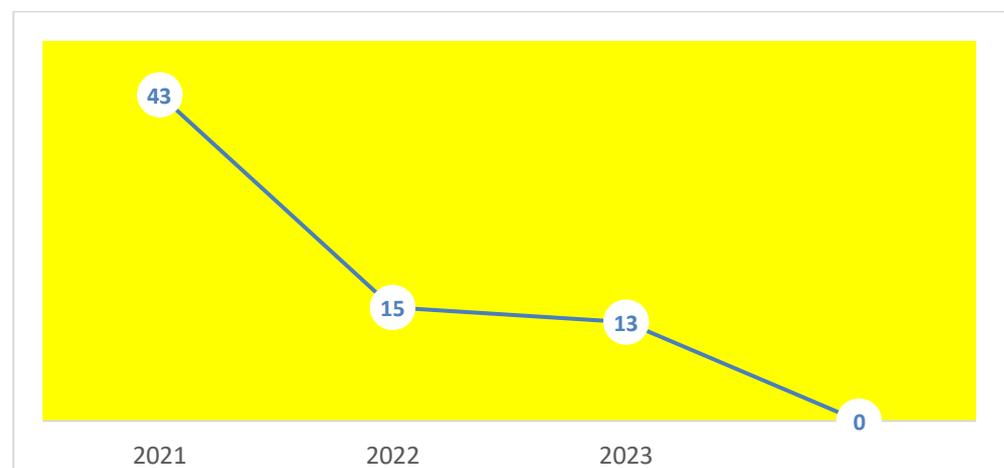
Dari grafik diatas dapat dilihat indikator kinerja Angka Kematian Bayi di Kabupaten pasangkayu dari tahun 2021 sampai dengan 2023, mengalami penurunan hingga menyentuh angka hanya 16 angka kematian bayi

adapun upaya dan dukungan dalam mengatasi meningkatnya angka kematian bayi Upaya penekanan yang dilakukan Puskesmas ini dalam menekan Angka Kematian Bayi adalah dengan adanya program kesehatan bagi Ibu dan Anak yang meliputi adanya PKH (Program Keluarga Harapan), ,Jamkesda, Imunisasi, dan Jampersal. Dalam upaya penekanan angka kematian bayi Puskesmas memiliki faktor penghambat yaitu kesadaran masyarakat. Adapun faktor pendukung dalam menekan angka kematian bayi adalah sumber daya manusia dan fasilitas yang diberikan pemerintah. Tingkat keberhasilan dalam menekan angka kematian bayi Puskesmas ini angka kematian bayi menurun.

### 3. Angka Kematian Neonatal

Kematian bayi pada masa neonatal terutama disebabkan oleh tetanus neonatorum dan gangguan perinatal sebagai akibat dari kehamilan risiko tinggi seperti :asfiksia, bayi berat lahir rendah, dan trauma lahir. Derajat kesehatan neonatal itu sendiri sangat terkait dengan kesehatan ibu semasa kehamilan, pertolongan persalinan dan perawatan bayi baru lahir. Untuk itu berbagai upaya yang dinilai mempunyai dampak ungit besar terhadap penurunan angka kematian bayi telah dilaksanakan antara lain melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar di tingkat masyarakat, upaya pendayagunaan dan intensifikasi posyandu untuk kegiatan KIA dasar dan keluarga berencana, termasuk di dalamnya pendekatan tempat pelayanan yakni dengan ditempatkannya tenaga bidan di desa.

Angka Kematian Neonatal Tahun . 2021 – 2023 di Kabupaten Pasangkayu



Dari grafik diatas dapat dilihat indikator kinerja Angka Kematian Bayi di Kabupaten pasangkayu dari tahun 2021 sampai dengan 2023, mengalami penurunan hingga menyentuh angka hanya 13 angka kematian bayi

Beberapa Upaya yang dilakukan dalam penurunan angka kematian neonatal adalah :

1. Peningkatan ketrampilan petugas tentang manajemen BBLR, asfiksia, dan penanganan kegawat daruratan bayi,
2. Adanya rujukan dini terencana;
3. Melaksanakan skill assesment pada gawat darurat neonatal dengan sasaran tenaga kesehatan
4. Melakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) pada kasus near miss dan atau kematian neonatal
5. Pemberian pelayanan ANC terpadu

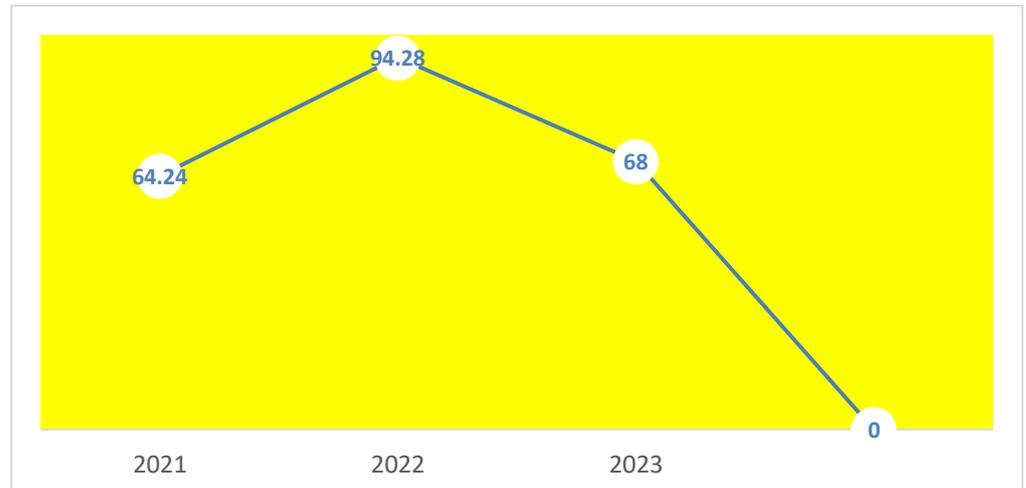
#### **4. Pelayanan kesehatan pada balita**

Pelayanan kesehatan pada balita merupakan kelompok tersendiri yang dalam perkembangan dan pertumbuhan memerlukan perhatian khusus, bila perkembangan dan pertumbuhan pada masa balita ini mengalami gangguan, hal ini akan berakibat terganggunya persiapan terhadap pembentukan anak yang berkualitas. Sejalan dengan hal tersebut, untuk memantapkan upaya yang dimaksud dalam rangka pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu yang memerlukan peran serta pemerintah daerah dan lintas sektor, maka ditetapkan Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan program pembinaan Posyandu, petugas Puskesmas dan stakeholder lainnya berkewajiban untuk meningkatkan pemahamannya tentang Posyandu agar pelaksanaan dapat berjalan dengan efektif.

berbagai upaya yang dilakukan untuk menurunkan kesakitan dan faktor resiko terhadap balita

1. Melakukan revitalisasi Posyandu
2. Memperkuat kelembagaan Pokjanal Posyandu
3. Meningkatkan transformasi KMS ke dalam Buku KIA
4. Memperkuat kader Posyandu

5. Menyelenggarakan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita pelayanan kesehatan pada Anak balita Tahun . 2021 – 2023 di Kabupaten Pasangkayu



**5. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta**

Stunting adalah masalah kesehatan yang banyak ditemukan di negara berkembang. Stunting atau pendek merupakan masalah kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya.

Berdasarkan data puskesmas dapat kita lihat bahwa prevalensi stunting dari tahun 2021 sampai 2023. Pada tahun 2023 cenderung menurun dibandingkan dari tahun sebelumnya. Penanganan stunting belum sepenuhnya berjalan.

Adapun yang menjadi faktor pendukung dan penghambat penanganan stunting dapat kita lihat berdasarkan uraian dibawah ini.

Faktor pendukung:

1. Letak geografis, beberapa desa di kabupaten pasangkayu yang berada pada dataran rendah dan memiliki akses jalan yang baik merupakan faktor pendukung yang memudahkan

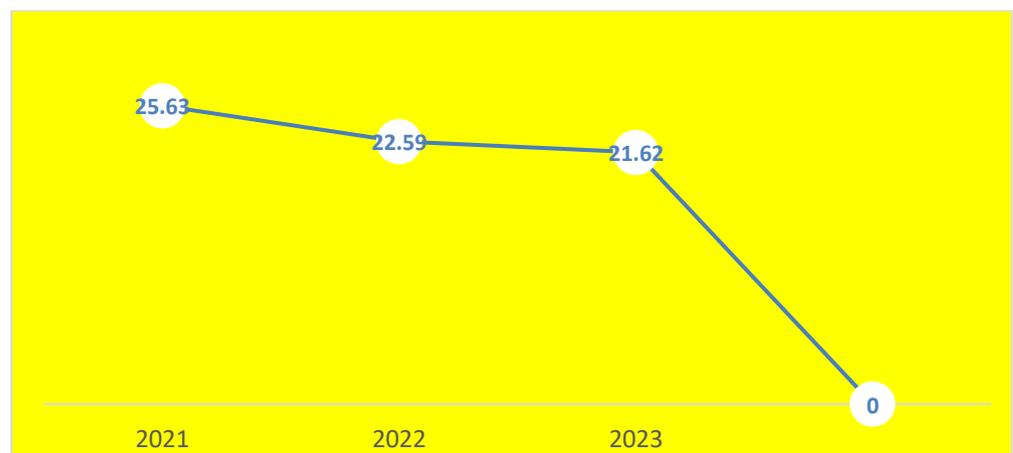
- pemerintah desa melaksanakan pelayanan publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan stunting
2. Masyarakat Yang Mulai Sadar Gizi Terutama Ibu Hamil dan Anak, Peran masyarakat langsung dalam program penanganan stunting merupakan kunci penting dari keberhasilan program itu sendiri. Utamanya kesadaran akan pentingnya pemenuhan gizi dan menjaga kebersihan lingkungan. Peran pemerintah desa terbatas pada pemberian pengetahuan kesehatan kepada masyarakat desa sehingga masyarakat desa dapat menyadari dengan sendirinya. Dibanding mengarahkan masyarakat desa untuk melaksanakan program penanganan stunting, pemerintah Desa diharapkan untuk memberi pelayanan publik terkait penanganan stunting

Faktor penghambat:

1. Kepercayaan dan Adat Setempat. Sebagian besar masyarakat desa tentunya masih memegang kepercayaan dan adat setempat. Bagaimanapun hal tersebut tidak dapat ditinggalkan karena hal tersebut berkaitan dengan norma yang berlaku. Meskipun adat dan kepercayaan tersebut tidak lagi dipegang oleh semua masyarakat namun tetap saja hal tersebut mempengaruhi pelaksanaan program penanganan stunting baik secara langsung maupun tidak
2. Banyaknya Ibu Hamil Yang Berada Pada Usia Muda Dengan Tingkat Pendidikan Rendah. Pada daerah pedesaan, menikah pada usia muda merupakan hal yang wajar terutama jika hal tersebut berkaitan dengan kepercayaan dan adat yang dipercaya. Namun sangat disayangkan bahwa tanpa disadari hal tersebut justru menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak terlahir dalam kondisi stunting, terutama jika si ibu memiliki tingkat pendidikan rendah.

3. Kurangnya Kepedulian Terhadap Lingkungan. Seperti masyarakat yang masih mencuci pakaian dan mandi disungai, membuat tempat sampah yang masih berada dalam lingkungan rumah dan berjarak dekat dengan rumah warga, serta kebiasaan masyarakat yang masih membuang sampah di sungai. Sebelumnya telah disebutkan bahwa kebersihan lingkungan merupakan faktor yang memberi pengaruh kelangsungan hidup satu sama lain yang dapat berakibat pada kesehatan setiap warga

Prevalensi Stunting pada anak balita . 2021 – 2023 di Kabupaten Pasangkayu



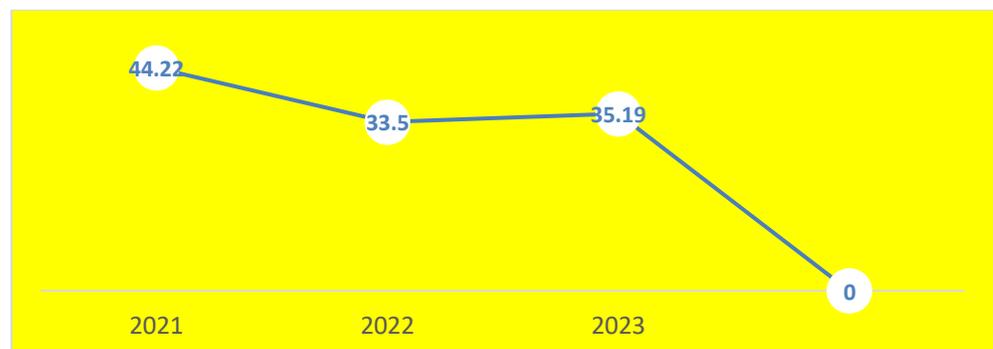
## 6. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI

Makanan pendamping ASI (MP-ASI) adalah makanan tambahan yang diberikan kepada bayi setelah bayi berusia 6 bulan sampai bayi berusia 24 bulan. Jadi selain Makanan Pendamping ASI, ASI-pun harus tetap diberikan kepada bayi, paling tidak sampai usia 24 bulan, peranan makanan pendamping ASI sama sekali bukan untuk menggantikan ASI melainkan hanya untuk melengkapi ASI jadi dalam hal ini makanan pendamping ASI berbeda dengan

makanan sapihan diberikan ketika bayi tidak lagi mengkonsumsi ASI

Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) merupakan proses perubahan dari asupan susu menuju ke makanan semi padat. Hal ini dilakukan karena bayi membutuhkan lebih banyak gizi. Bayi juga ingin berkembang dari refleks menghisap menjadi menelan makanan yang berbentuk cairan semi padat dengan memindahkan makanan dari lidah bagian depan ke belakang. Makanan pendamping ASI merupakan makanan bayi kedua yang menyertai dengan pemberian ASI. Makanan Pendamping ASI diberikan pada bayi yang telah berusia 6 bulan atau lebih karena ASI tidak lagi memenuhi gizi bayi. Pemberian makanan pendamping ASI harus bertahap dan bervariasi dari mulai bentuk sari buah, buah segar, bubur kental, makanan lumat, makanan lembek, dan akhirnya makanan padat. Alasan pemberian MP-ASI pada usia 6 bulan karena umumnya bayi telah siap dengan makanan padat pada usai ini

Cakupan pemberian Pendamping ASI Pada 2021 – 2023 di Kabupaten Pasangkayu



## 7. Prevalensi kekurangan gizi pada bayi dan balita

Kondisi kekurangan gizi (underweight) pada balita ditandai dengan berat badan yang berada pada posisi batas garis merah pada kartu status kesehatan balita. Kondisi ini akan terus menurun yang pada akhirnya dapat menyebabkan status gizi kurang kalau

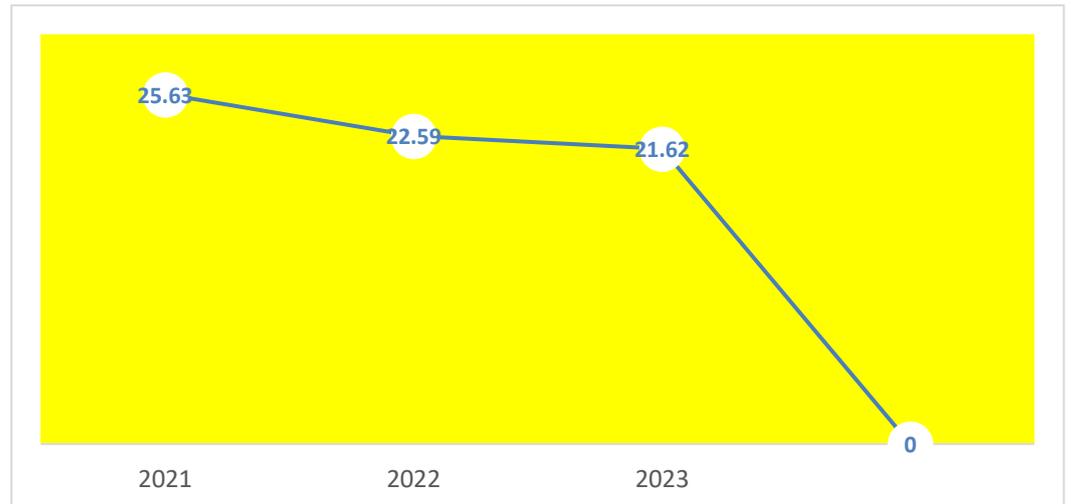
tidak segera ditangani. Banyak sebab yang mengakibatkan terjadinya gizi kurang ini, salah satunya adalah pemantauan kesehatan yang belum maksimal. Masih adanya masyarakat yang belum melaksanakan pemeriksaan rutin bagi balitanya ke sarana pelayanan kesehatan.

Adapun Upaya yang dilakukan dalam perbaikan gizi untuk peningkatan mutu gizi perseorangan hingga masyarakat tersebut, dilakukan melalui:

1. perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang
2. perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan
3. peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
4. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

Pelayanan gizi di puskesmas terdiri dari kegiatan di dalam maupun di luar gedung puskesmas. Pelayanan dalam gedung umumnya pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative, sedangkan pelayanan di luar gedung umumnya pelayanan gizi pada kelompok masyarakat dalam bentuk preventif dan promotif. Sebagai upaya penatalaksanaan gizi kurang atau gizi buruk, Puskesmas menerapkan asuhan keperawatan pada pasien gizi kurang atau buruk. Asuhan keperawatan merupakan proses atau rangkaian kegiatan pada praktik keperawatan yang diberikan secara langsung kepada klien/pasien di berbagai tatanan pelayanan kesehatan.

Prevalensi stunting Pada 2021 – 2023 di Kabupaten Pasangkayu

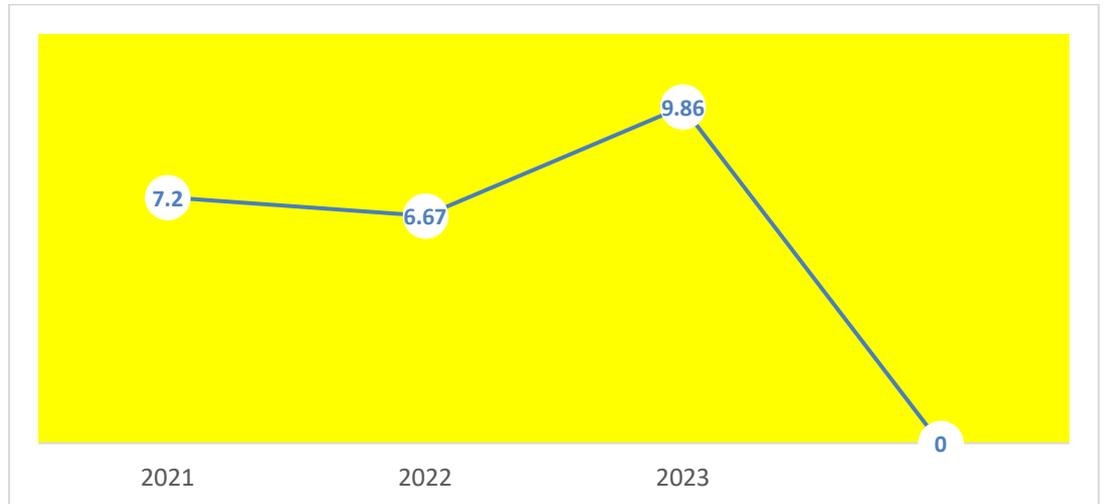


## 8. Prevalensi Anak Balita Pendek(Wasting)

Prevalensi balita kurus menurut kabupaten/kota dan Puskesmas tahun 2020 menempati urutan tertinggi dan belum mencapai target nasional. Jumlah kasus balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan mengalami peningkatan pada tahun 2020. Puskesmas Mantrijeron menjadi puskesmas dengan jumlah kasus wasting tertinggi balita gizi buruk dengan perawatan. Prevalensi wasting di Puskesmas juga mengalami peningkatan di tahun 2023

wasting disebabkan oleh empat faktor yaitu penyebab langsung, penyebab tidak langsung, masalah utama, masalah dasar. Pada penelitian sebelumnya, masih terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian wasting pada balita, diantaranya faktor penyakit infeksi (diare dan demam), riwayat pemberian ASI eksklusif, dan sosiodemografi (tingkat pendidikan ibu dan status pekerjaan ibu).

### Prevalensi wasting Pada 2021 – 2023 di Kabupaten Pasangkayu



Berbagai program dan upaya telah dilakukan pemerintah untuk senantiasa meningkatkan taraf hidup anak, begitu pula di sektor kesehatan. Meski demikian, Indikator angka kematian yang berhubungan dengan anak yakni Angka Kematian Neonatal (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA) dan lainnya. masih tergolong tinggi yakni dalam 3 tahun terakhir, sudah mengalami penurunan, Pada 2023 dilaporkan masih terdapat beberapa kasus yang belum memenuhi target. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan peran keluarga. Keluarga memiliki peran penting dalam peningkatan taraf hidup anak hingga mengurangi jumlah kematian anak. Maka dibuatlah program pendekatan keluarga yang diatur dalam Permenkes RI No 39 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan program indonesia sehat dengan pendekatan keluarga, disebutkan berbagai upaya untuk menurunkan angka kematian anak dalam berbagai kelompok usia:

Keberhasilan dalam menekan angka kematian bayi didukung oleh adanya partisipasi aktif 1 x 24 jam tenaga kesehatan dalam melakukan rujukan dini terencana terhadap bayi yang akan lahir. Dimana pada saat bayi dalam kandungan berpotensi

mengalami fetal distress yang disebabkan oleh asfiksia (kekurangan oksigen), sehingga berbagai penyebab kematian dapat diketahui dan diambil upaya antisipasi pencegahan maupun kegawatdaruratan. Faktor pendukung lain semakin membaiknya jejaring koordinasi antara Dinas Kesehatan dengan Bidan Penanggung jawab Wilayah serta Bidan Praktik Mandiri.

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk menurunkan Angka Kematian Anak Antara Lain:

1. Meningkatkan koordinasi antara Dinas Kesehatan dengan semua rumah sakit, bidan koordinator puskesmas/bidan penanggung jawab wilayah dan bidan praktik mandiri terkait rujukan dini terencana untuk bayi baru lahir dengan risiko asfiksia.
2. Audit Maternal Perinatal (AMP) atau pengkajian dan pembahasan kematian maternal perinatal dan neonatal oleh SpOG dan SpA dengan narasumber SpOG konsultan dan SpA konsultan dari Provinsi.
3. Menindaklanjuti hasil rekomendasi AMP bagi rumah sakit, bidan puskesmas, bidan praktek mandiri, Kepala Puskesmas, Institusi Kebidanan.
4. Meningkatkan Kerjasama tim dalam menangani kasus kehamilan atau kebidanan dengan risiko tinggi dan kasus bayi dengan komplikasi.
5. Meningkatkan pendampingan/pemantauan ibu mulai dari masa hamil sampai masa nifas 42 hari oleh kader, petugas, dan bidan wilayah.
6. Meningkatkan pendampingan/pemantauan bayi baru lahir dan balita

## **9. Meningkatkan kesehatan ibu**

program dan upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesehatan ibu , terdiri dari angka kematian ibu,persalinan ibu,pelayanan kesehatan ibu,. masih tergolong tinggi yakni dalam 3 tahun terakhir,sudah mengalami penurunan,namun Pada 2023

dilaporkan masih terdapat beberapa kasus yang belum memenuhi target

Peran puskesmas untuk menurunkan Angka Kematian Ibu dan meningkatkan kesehatan maternal dengan melaksanakan program KIA dalam memeriksa kesehatan ibu hamil memantau perkembangan, pertumbuhan bayi, membantu menolong persalinan dan pelajaran selama masa nifas, serta mengadakan kegiatan dalam bentuk sebuah pelatihan pada dukun bersalin dan kader). Selain itu, tugas puskesmas bertanggung jawab dalam memelihara kesehatan masyarakat pada wilayah kerjanya untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat seoptimal mungkin.

Dalam pelaksanaan program tersebut terdapat berbagai kendala sehingga program tersebut belum berhasil dan perlu ditingkatkan lagi. Pengetahuan dan persepsi masyarakat yang masih kurang akan kelas ibu hamil Selain itu, factor lain yakni kurangnya informasi bagi masyarakat, sarana dan prasarana masih kurang dan keterbatasan dana yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K)

Dalam rangka menurunkan angka kematian ibu (AKI) Puskesmas dan jaringannya; penguatan manajemen program dan sistem rujukannya; meningkatkan peran serta masyarakat; kerjasama dan kemitraan; kegiatan akselerasi dan inovasi adapun upaya-upaya yang dilakukan dinas kesehatan dalam menurunkan angka kematian ibu

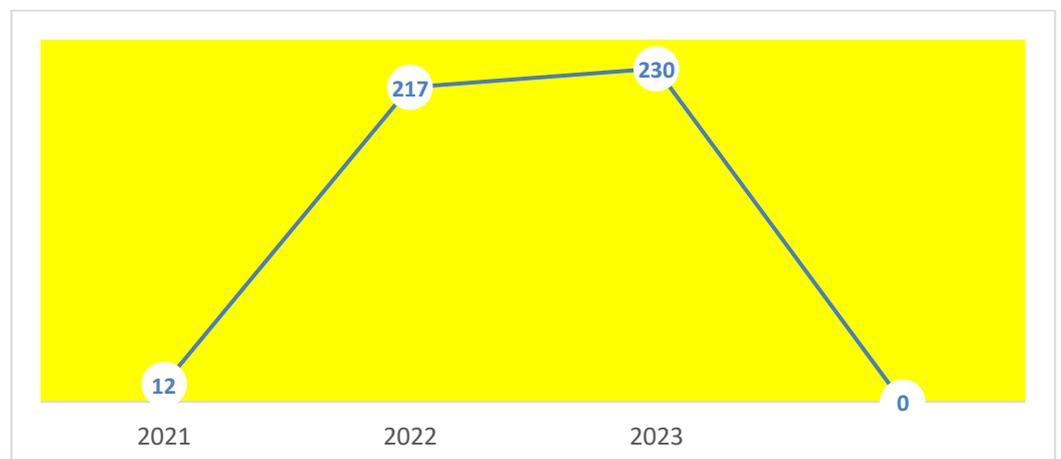
1. kerjasama puskesmas dengan sektor terkait dan pemerintah setempat Tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan melalui kegiatan sosialisasi, fasilitasi dan advokasi terkait percepatan pencapaian yaitu mengentaskan kemiskinan ekstrim dan kelaparan, mengurangi tingkat kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya.

2. pemberian Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Puskesmas mendapat BOK, yang besarnya bervariasi. Dengan adanya BOK, pelayanan “outreach” di luar gedung terutama pelayanan KIA-KB dapat lebih mendekati masyarakat yang membutuhkan.

Beberapa faktor yang menjadi Hambatan dalam meningkatkan kesehatan ibu diantaranya

1. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat terkait perawatan kehamilan, persalinan dan pasca persalinan
2. Masih rendahnya pengembangan dan pemanfaatan potensi lokal dalam upaya perawatan kesehatan ibu hamil dan bersalin
3. Potensi Sumber Daya Lokal Yang Bisa Dimanfaatkan Dalam Upaya Mengurangi Resiko Kematian Ibu Keberadaan dukun
4. Pola interaksi dan komunikasi yang berbasiskan sosial budaya masyarakat.

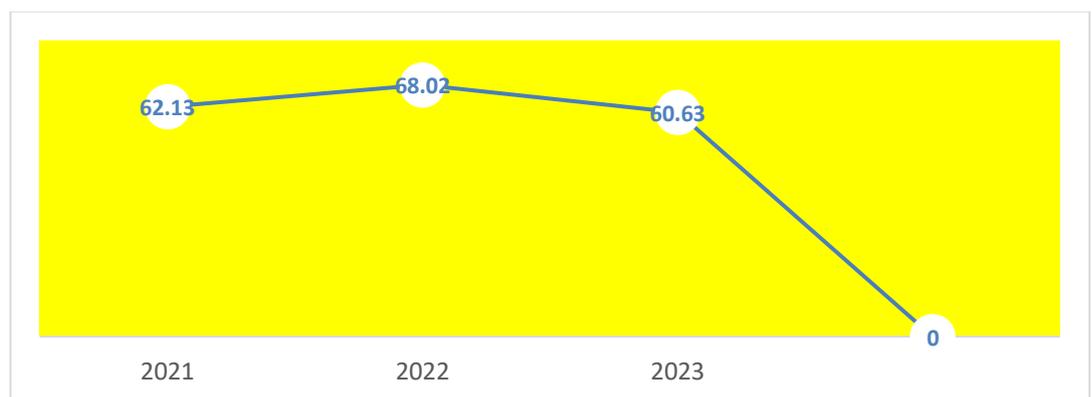
Angka kematian ibu Pada 2021 – 2023 di Kabupaten Pasangkayu



Berdasarkan Dari grafik diatas dapat dilihat indikator kinerja Angka Kematian ibu di Kabupaten pasangkayu dari tahun 2021 sampai dengan 2023, mengalami peningkatan hingga menyentuh angka hanya 230

Dalam pelaksanaan program tersebut terdapat berbagai kendala sehingga program tersebut belum berhasil dan perlu ditingkatkan lagi. Pengetahuan dan persepsi masyarakat yang masih kurang akan kelas ibu hamil Selain itu, factor lain yakni kurangnya informasi bagi masyarakat, sarana dan prasarana masih kurang dan keterbatasan dana yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K). kurangnya pemanfaatan rumah tunggu dari masyarakat serta akses yang jauh dalam menjangkau rumah tunggu.

#### Persalinan Oleh Nakes 2021 – 2023 di Kabupaten Pasangkayu



Berdasarkan Dari grafik diatas dapat dilihat indikator kinerja Angka Kematian ibu di Kabupaten pasangkayu dari tahun 2021 sampai dengan 2023, pada tahun 2023 mengalami penurunan hingga menyentuh angka 60,63 %

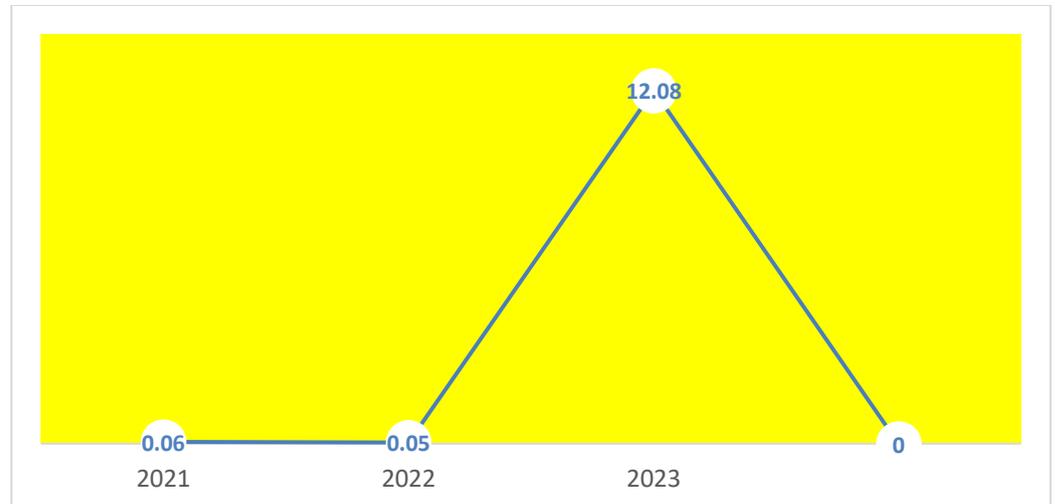
Cakupan persalinan tahun 2023 untuk kabupaten pasangkayu sebesar 60,63%,puskesmas pasangkayu 2 dengan capaian tertinggi sebesar 85,85 %,persalinan dengan capaian yang terendah adalah di puskesmas pedongga sebanyak 37,32 % ,persalinan Kabupaten pasangkayu sejak 2 tahun terakhir melakukan program inovasi

Kegiatan–kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan kabupaten pasangkayu dalam rangka peningkatan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan adalah dengan melakukan Pelatihan Asuhan Persalinan Normal bagi bidan Puskesmas dan Bidan desa

#### 10. Memerangi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya

program dan upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan dan memerangi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya , terdiri dari penemuan kasus malaria dan kasus TB. masih tergolong tinggi yakni dalam 3 tahun terakhir,sudah mengalami penurunan,namun Pada 2023 dilaporkan masih terdapat beberapa kasus yang belum memenuhi target

Prevalensi Kasus HIV/AIDS 2021 – 2023 di Kabupaten Pasangkayu

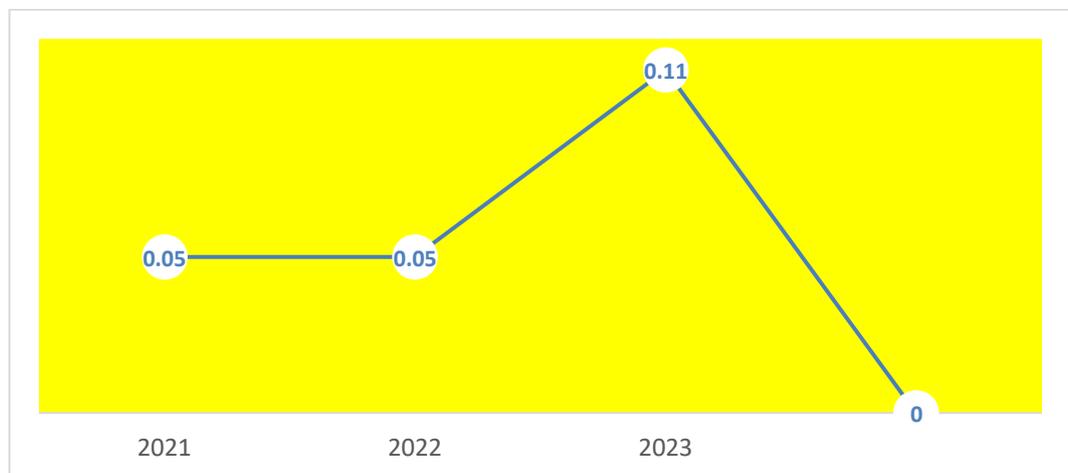


Berdasarkan Dari grafik diatas dapat dilihat indikator kinerja prevalensi HIV/AIDS di Kabupaten pasangkayu dari tahun 2021 sampai dengan 2023, pada tahun 2023 Terjadi peningkatan hingga menyentuh angka 12,02 %

Penyakit HIV/AIDS menimbulkan masalah yang cukup luas pada individu yang terinfeksi HIV/AIDS yaitu meliputi masalah fisik, sosial dan masalah emosional. Salah satu masalah emosional terbesar yang dihadapi ODHA adalah depresi. Depresi adalah penyakit suasana hati, depresi lebih dari sekedar kesedihan atau duka cita. Depresi adalah kesedihan atau duka cita yang lebih hebat dan bertahan terlalu lama. Depresi digambarkan suatu kondisi yang lebih dari suatu perasaan sedih dan kehilangan gairah serta semangat hidup

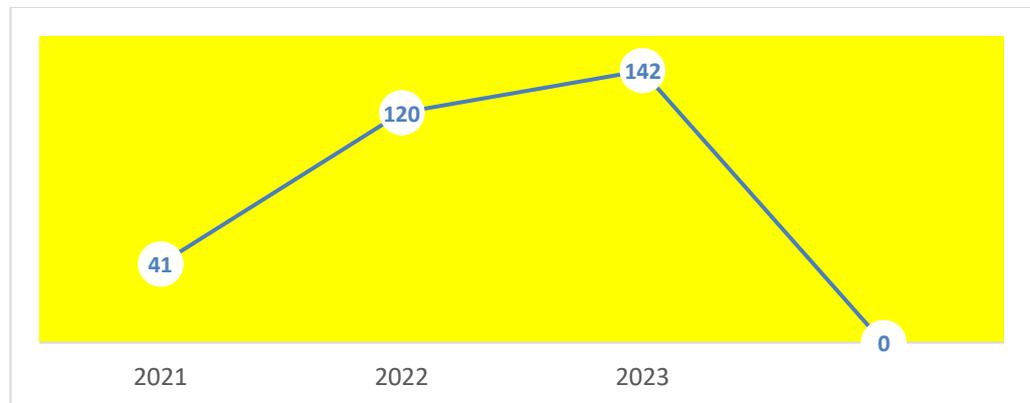
Adapun upaya yang dilakukan Pada tahun 2023 program penanggulangan HIV/AIDS dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Pasangkayu yang di danai oleh Global Fund. Adapun kegiatan yang telah dilakukan adalah pemeriksaan VCT dan Konseling dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut

Angka Penemuan Kasus Malaria per 1.000 Penduduk 2021 – 2023 di Kabupaten Pasangkayu



Berdasarkan Dari grafik diatas dapat dilihat indikator kinerja Angka Penemuan Kasus Malaria per 1.000 Penduduk di Kabupaten pasangkayu dari tahun 2021 sampai dengan 2023, pada tahun 2023 Terjadi peningkatan hingga menyentuh angka 0,11 %

Jumlah Kasus TBC per 100.000 penduduk tahun 2021 – 2023 di Kabupaten Pasangkayu



Berdasarkan Dari grafik diatas dapat dilihat indikator kinerja Jumlah Kasus TBC per 100.000 penduduk per 1.000 Penduduk di Kabupaten pasangkayu dari tahun 2021 sampai dengan 2023, pada tahun 2023 Terjadi peningkatan hingga menyentuh angka 142 %

Upaya yang dilakukan puskesmas melalui gerakan terpadu nasional, memiliki upaya untuk meningkatkan kemampuan Puskesmas untuk melakukan diagnosis TB berdasarkan pemeriksaan BTA ini. Pemeriksaan dahak dilakukan sedikitnya 3 kali, yaitu pengambilan dahak sewaktu penderita datang berobat dan dicurigai menderita TB, kemudian pemeriksaan kedua dilakukan keesokan harinya, yang diambil adalah dahak pagi. Sedangkan pemeriksaan ketiga adalah dahak ketika penderita memeriksakan dirinya sambil membawa dahak pagi. Oleh sebab itu, disebut pemeriksaan SPS (Sewaktu-Pagi-Sewaktu).

Adapun Faktor penghambat yang dialami dalam pelaksanaan penanggulangan kasus TB

1. penemuan kasus Tuberkulosis dilakukan dengan cara menunggu penderita TB datang ke Puskesmas dan laporan dari kader kesehatan.

2. Sosialisasi oleh pihak Puskesmas terkait program TB jarang dilakukan, sehingga pengetahuan masyarakat terkait penyakit TB rendah.
3. keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, logistik TB dan sarana prasarana unit DOTS serta ketergantungan sumber daya terhadap pihak investasi, tidak adanya pedoman operasional yang mengatur mekanisme kerjasama, kurangnya komitmen pemerintah dan mitra dalam implementasi pengendalian TB, kurangnya komunikasi dan koordinasi antara jejaring PPM dalam menjaga pengobatan penderita
4. Kurangnya dukungan keluarga meliputi Pengawas Minum Obat (PMO) pasien TB

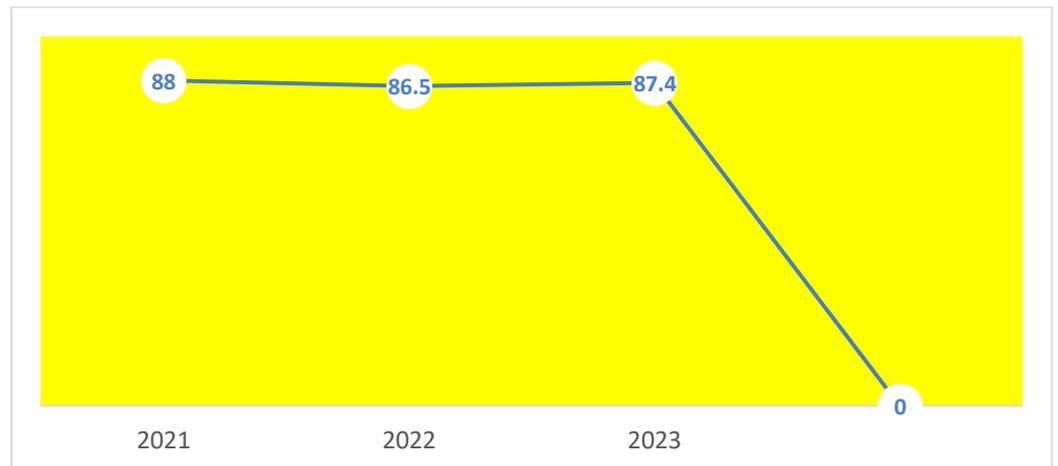
Berdasarkan uraian laporan penyakit diatas dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan dalam menangani kasus penularan penyakit yaitu berbagai strategi dilakukan melalui

1. Peningkatan surveilans epidemiologi faktor risiko dan penyakit menular langsung
  2. Peningkatan perlindungan kelompok berisiko
  3. Penatalaksanaan epidemiologi kasus dan pemutusan rantai penularan
  4. Pencegahan dan penanggulangan KLB / wabah termasuk yang berdimensi internasional
  5. Pemberdayaan dan peningkatan peran swasta dan masyarakat
  6. Peningkatan keterpaduan program promotif & preventif dlm pengendalian penyakit menular langsung
4. Kesehatan Lingkungan

program dan upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan dan dan memelihara kesehatan lingkungan , terdiri dari

penggunaan air bersih, penggunaan jamban, namun Pada 2023 dilaporkan masih terdapat beberapa kasus yang belum memenuhi target diantaranya dapat dilihat grafik dibawah ini.

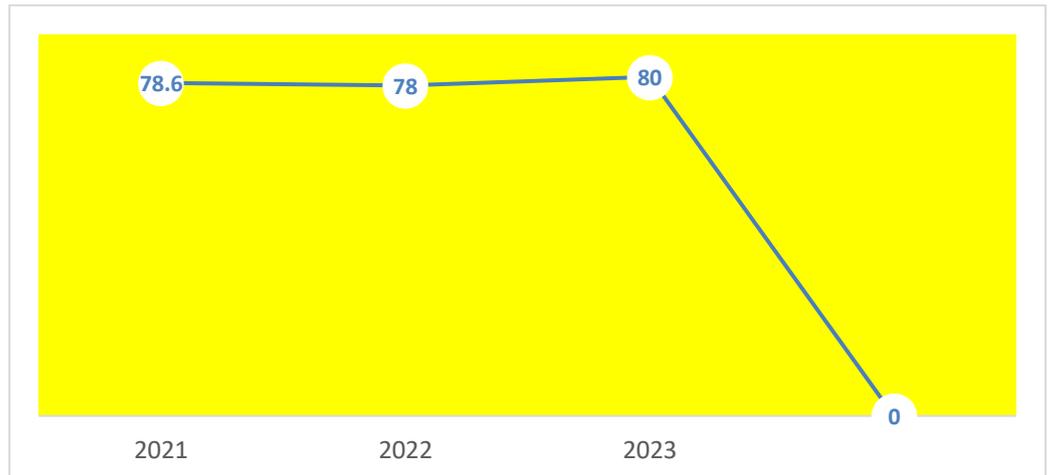
Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap Air minum yang berkualitas tahun 2021 – 2023 di Kabupaten Pasangkayu



Berdasarkan Dari grafik diatas dapat dilihat indikator kinerja Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap Air minum yang berkualitas di Kabupaten pasangkayu dari tahun 2021 sampai dengan 2023, pada tahun 2023 Terjadi peningkatan hingga menyentuh angka 87,4 dan melebihi dari target

Upaya yang dilakukan yaitu menyediakan sarana air bersih dan sanitasi baik di pedesaan maupun di perkotaan dilakukan antara lain melalui program Penyediaan Air minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Persentase penduduk yang menggunakan jamban Sehat tahun 2021 – 2023 di Kabupaten Pasangkayu



Berdasarkan Dari grafik diatas dapat dilihat indikator kinerja Persentase penduduk yang menggunakan jamban Sehat di Kabupaten pasangkayu dari tahun 2021 sampai dengan 2023, pada tahun 2023 Terjadi peningkatan hingga menyentuh angka 80 dan melebihi dari target 65

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penggunaan jamban di masyarakat dengan cara petugas puskesmas

1. Melakukan penyuluhan tentang jamban sehat, pembuatan septic tank komunal dan arisan jamban ke masyarakat
2. Membuat dan membagikan media edukasi tentang pentingnya jamban sehat yang mudah di jangkau dan dimengerti bagi masyarakat
3. Memasang stiker di rumah yang telah memiliki jamban sehat

Berdasarkan uraian kesehatan lingkungan diatas dapat disimpulkan bahwa akses air bersih, penggunaan jamban, u dilakukan untuk mewujudkan lingkungan sehat, untuk mencegah berbagai macam gangguan penyakit terhadap kesehatan yaitu berbagai strategi dilakukan sebagai berikut ini

1. Membangun masyarakat hidup bersih dan sehat melalui pembangunan sistem air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.

2. Mengarusutamakan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat.
3. Menerapkan tiga pengembangan Sarana Penyediaan Air Minum (SPAM) di desa sasaran, yaitu pembangunan SPAM baru, perluasan SPAM di desa yang telah memiliki SPAM, dan peningkatan dan pengembangan kinerja SPAM.
4. Melakukan sharing pembiayaan program melalui APBN, APBD, dan APBDes.
5. Menerapkan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) pada skala kabupaten untuk mencapai target akses sanitasi yang layak dan masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat.
6. Memperkuat kelembagaan di tingkat kabupaten, seperti Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) dan Asosiasi Pengelola SPAM perdesaan.
7. Memperkuat peran Pemerintah Desa untuk mengelola dan mengembangkan SPAM perdesaan.
8. Memperkuat peran Kader Desa untuk berperan aktif sebagai mitra pemerintah desa untuk urusan pembangunan AMPL.
9. Mensinergikan PAMSIMAS dengan berbagai program pengembangan air minum lainnya.

Faktor penghambat penyelenggaraan program kesehatan lingkungan di puskesmas antara lain sebagai berikut:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana
3. Keterbatasan Anggaran

Terlepas dari capaian diatas pemerintah daerah yang terus akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang merata, serta akses pelayanan kesehatan. Keberhasilan kebijakan ini akan berdampak besar terhadap peningkatan kesehatan masyarakat yang baik di Kabupaten Pasangkayu yang pada gilirannya akan memberi dampak positif pada pencapaian target akhir masa berlakunya RPJMD yakni tahun 2026.

**Tabel 3.2.3**  
**Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Sasaran : Membaiknya Kinerja Standar Hidup**

No	Indikator	Target (2023)	Realisasi Tahun		Capaian
			2022	2023	
1	Indeks Paritas Daya Beli	74,41	-	-	76,77
2	Indeks Pembangunan Keluarga	50,50	-	60,15	119
3	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	100	10	25	25
4	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	0	0,008	0,02	2
5	Persentase Peningkatan Cakupan Peserta ber KB	48,1	57,69	65,54	136

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian target kinerja tahun 2023 untuk sasaran **Membaiknya Kinerja Standar Hidup** cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat indikator cukup meningkat dari tahun sebelumnya walaupun tidak dipungkiri masih ada bagian dari indikator yang belum maksimal. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indeks Paritas Daya Beli belum dapat terukur dengan baik.
2. Pasangkayu berada pada kategori keluarga berkembang

3. 20 Layanan adalah target kinerja. Pada tahun 2023 terdapat 5 kasus kekerasan dan ke 5 kasus tersebut mendapatkan penanganan oleh bidang PP
4. Bertambahnya jumlah kekerasan terhadap anak di tahun 2023
5. Sisa Target peserta berKB lebih sedikit dibanding ditahun 2022, sehingga persentase peserta beKB meningkat ditahun 2023

Terlepas dari capaian diatas pemerintah daerah terus akan meningkatkan kinerja standar hidup, guna mencapai standar hidup masyarakat yang lebih baik. Keberhasilan kebijakan ini akan berdampak besar terhadap standar hidup masyarakat yang baik di Kabupaten Pasangkayu yang pada gilirannya akan memberi dampak positif pada pencapaian target akhir masa berlakunya RPJMD yakni tahun 2026.

**MISI 2 : “MEMPERKUAT STRUKTUR EKONOMI PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING”**

Untuk misi “**Memperkuat Struktur Ekonomi Produktif dan Berdaya Saing**” bertujuan untuk Meningkatkan Kinerja Perekonomian Daerah. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja dapat diuraikan pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.2.4**

**Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama  
Sasaran : Membaiknya Struktur Ekonomi Daerah**

No	Indikator	Target 2023	Realisasi Tahun		Capaian
			2022	2023	
1	Pendapatan Perkapita	62,00	64,38	-	-
2	Pertumbuhan Ekonomi	7,53	-	6,78	90
3	Pertumbuhan produksi perikanan budidaya	8098	9557.45	9110.88	112
4	Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB	7.57	0.99	-	-

5	Tingkat produktivitas padi perhektar	8760.17	40,14	5 Ton/Ha	0.1
6	Jumlah kelompok tani memperoleh modal usaha	-	-	-	-
7	Jumlah masyarakat/ kelompok tani menggunakan teknologi	-	-	-	-
8	Pembangunan Jalan Pertanian	8750	14879	-	-
9	Jumlah kelompok tani yang tersusun	-	1521	150	150
10	Jumlah desa wisata	5	5	5	100
11	Jumlah Grup Kesenian Budaya	30	28	28	93
12	Pengembangan sarana dan pra sarana tujuan wisata	15	8	8	53
13	Panjang Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan	228	37,562	12,137	5
14	Jumlah Bantuan Pupuk	500.000	9.045	-	-
15	Jumlah Bantuan Bibit Kakao Sambung Pucuk	40.750	20.235	-	-

16	Jumlah Ternak Yang Diinseminasi Buatan	773	590	-	-
17	Jumlah Kelahiran Ternak Yang di Inseminasi	481	361	-	-

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian target kinerja tahun 2023 untuk sasaran **Membbaiknya Struktur Ekonomi Daerah** cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat indikator cukup meningkat dari tahun sebelumnya walaupun tidak dipungkiri masih ada bagian dari indikator yang belum maksimal. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan Perkapita belum diukur oleh Perangkat Daerah terkait.
2. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator ini biasanya digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijaksanaan pembangunan yang akan datang. Untuk mengukur besarnya laju pertumbuhan tersebut dapat dihitung dari data PDRB atas dasar harga konstan.
3. Produksi turun dikarenakan anomali cuaca, kenaikan harga pakan dan kenaikan harga udang mengalami penurunan sebesar 47%.
4. Laju pertumbuhan PDRB tahun 2023 belum ada di Pasangkayu dalam angka. Distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku yang terbesar pada tahun 2023 adalah di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu sebesar 48,10 persen.

5. Tidak adanya penambahan produksi karena tidak ada penambahan areal tanam dan sarana penunjang produksi yang sangat terbatas (benih dan pupuk) .
6. Tidak ada kelompok tani yang mendapatkan program modal usaha dari pemerintah
7. Belum ada kelompok tani yang menggunakan teknologi baru, masih tergantung bimbingan dari penyuluh.
8. Tidak ada program peningkatan jalan tani tahun 2023 akibat regulasi pusat.
9. Jumlah kelompok tani baru yang terbentuk dan baru terdaftar di aplikasi simluhtan.
10. Sarana dan Prasarana Pariwisata masih terbatas
11. Berkembangnya pembentukan sanggar seni oleh pelaku seni.
12. Anggaran terbatas.
13. Tahun 2023 terlaksana dengan panjang jalan 12,137 Km dengan capaian persentase 100 %.
14. Pada Tahun 2022 dapat terlaksana dengan jumlah 9.045 kg dan Tahun 2023 Tidak terlaksana karna tidak memiliki anggaran
15. Pada tahun 2022 baru dianggarkan Terealisasi sebanyak 20.235 Pohon dan pada tahun 2023 Tidak terlaksana karna tidak memiliki anggaran.
16. Tahun 2023 Tidak terlaksana karna tidak memiliki anggaran.
17. Tahun 2023 Tidak terlaksana karna tidak memiliki anggaran.

Terlepas dari capaian diatas pemerintah daerah terus akan meningkatkan kinerja struktur ekonomi daerah. Keberhasilan kebijakan ini akan berdampak besar terhadap struktur ekonomi masyarakat yang baik di Kabupaten Pasangkayu yang pada gilirannya akan memberi dampak positif pada pencapaian target akhir masa berlakunya RPJMD yakni tahun 2026

**Tabel 3.2.5**

**Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama  
Sasaran : Meluasnya Aktivitas Ekonomi Produktif**

No	Indikator	Target (2023)	Realisasi Tahun		Capaian
			2022	2023	

1	Tingkat Pengangguran Terbuka	2.24	2.38	2.02	111
2	Menurunnya presentase peredaran barang kadaluarsa, palsu dan ilegal	5	5	7	140
3	Jumlah pasar yang dipelihara	14	1	-	-
4	Jumlah nilai realisasi investasi	150.000.000.000	1.007.239.718.281	573.974.704.190	383
5	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	1.400	1.276	3.777	270
6	Rasio daya serap tenaga kerja	60	12	2.90	5
7	Jumlah investor berskala nasional/kabupaten (PMDN/PMA)	1500	1.276	4.197	280
8	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) atas kualitas pelayanan	80.20	87.37	90.79	11
9	Jumlah aplikasi perizinan dan non perizinan yang mendukung kinerja DPMPTSP secara elektronik	1	2	4	400

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian target kinerja tahun 2023 untuk sasaran **Meluasnya Aktivitas Ekonomi Produktif** cukup baik. Hal

ini dapat dilihat dari tingkat indikator cukup meningkat dari tahun sebelumnya walaupun tidak dipungkiri masih ada bagian dari indikator yang belum maksimal. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Target terpenuhi disebabkan meningkatnya jumlah angkatan kerja dari 90.869 orang pada tahun 2022 menjadi 104.383 orang pada tahun 2023.
2. Keterbatasan Anggaran Pengawasan, Hanya Mampu Menjangkau 5 Kecamatan dari 12 Kecamatan
3. Tidak adanya anggaran pemeliharaan yang diberikan, sementara kami tiap tahun mengusulkan untuk biaya pemeliharaan pasar.
4. Meningkatnya realisasi penanaman modal membuat perekonomian perlahan-lahan mulai membaik. Potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Pasangkayu menjadi daya tarik tersendiri bagi investor PMDN maupun PMA.
5. Pada tahun 2023, semakin banyak masyarakat yang antusias untuk membuat izin usaha pasca pandemi covid-19. Hal ini karena salah satu syarat untuk pengajuan pinjaman ke Bank adalah harus memiliki izin usaha.
6. Rasio tenaga kerja menunjukkan berapa rata-rata pekerja yang bekerja pada perusahaan. Banyaknya tenaga kerja yang masuk di perusahaan tergantung pada bidang yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Selain itu, perusahaan yang menggunakan tenaga mesin tentunya juga membutuhkan lebih sedikit karyawan.
7. Meningkatnya Nilai iklim penanaman modal dipengaruhi oleh indikator realisasi investasi PMA/PMDN, atau dengan kata lain indikator meningkatnya realisasi investasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor banyaknya investor yang berinvestasi di daerah baik investor berskala nasional maupun jumlah investor berskala kabupaten.
8. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas kualitas pelayanan ini mengalami peningkatan dengan realisasi 90.79% dengan nilai predikat "B" pada tahun 2023. Hal ini terjadi karena tuntutan standar pelayanan

yang menjadi persyaratan pelayanan prima dari lembaga OMBUDSMAN telah terpenuhi secara maksimal.

9. Indikator kinerja jumlah aplikasi perizinan dan non perizinan yang mendukung kinerja DPMPTSP secara elektronik pada tahun 2023 dengan realisasi 4 aplikasi program pelayanan perizinan. Hal ini juga yang membuat kualitas pelayanan di DPMPTSP mengalami peningkatan kualitas.

**Tabel 3.2.6**  
**Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Sasaran : Meningkatnya Daya Beli Masyarakat**

No	Indikator	Target (2023)	Realisasi Tahun		Capaian
			2022	2023	
1	Pengeluaran Perkapita Sebulan	1.254.062	-	1.272.175	101
2	Persentase jumlah kelompok ekonomi desa (mandiri ekonomi)	40	25	40	100
3	Ketersediaan pangan utama	2600	2.587	3068,0	118
4	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman di konsumsi	100,0	100,00	100,00	100
5	Jumlah Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya yang Dibangun	-	-	-	-

6	Kualitas Konsumsi Pangan yang Diindikasikan Oleh Skor PPH	79,00	62,20	80,2	101
7	Persentase Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian target kinerja tahun 2023 untuk sasaran **Meningkatnya Daya Beli Masyarakat** cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat indikator cukup meningkat dari tahun sebelumnya walaupun tidak dipungkiri masih ada bagian dari indikator yang belum maksimal. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk konsumsi makanan tahun 2023 di Kabupaten Pasangkayu sebesar Rp 663.224 dimana yang paling tinggi adalah kelompok makanan dan minuman jadi yaitu Rp146.814 (11,71%) dan yang paling rendah adalah pengeluaran umbiumbiansekitar Rp6.054 (0,48%). Pengeluaran rata-rata untuk rokok berada di posisi kedua yaitu sebesar Rp127.955 (10,20%). Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk barang non makanan sebesar Rp590.837 dimana yang paling tinggi adalah kelompok perumahan dan fasilitas rumah tangga yaitu Rp332.275 (25,71%) dan yang paling rendah adalah pengeluaran untuk keperluan pesta dan upacara sekitar Rp24.118 (1,92%).
2. Target kelompok ekonomi desa (ekonomi mandiri) pada tahun 2023 sebanyak 12 desa dan terealisasi sesuai dengan perencanaan di tahun 2023 sebanyak 40 desa atau 100%.
3. Ketersediaan Pangan Utama merupakan indicator bidang urusan pangan yang dilihat dari rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama (kg)/tahun dibagi dengan jumlah penduduk dikali 100%. Ketersediaan pangan utama sangat dipengaruhi sangat dipengaruhi

oleh produksi dalam daerah kabupaten dan adanya ekspor dan impor dari dan ke daerah lain. Untuk tahun 2023 persentase ketersediaan pangan utama sebesar 3.068 % mengalami peningkatan dibanding capaian pada tahun 2022 yakni 2.587 % dan mencapai target sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2023, yakni 2600%. (Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Outcome Pemerintah Daerah permendagri 86 tahun 2017)

4. Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang aman dikonsumsi. Keamanan Pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan terhadap keamanan pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi. Pada tahun 2023 pengawasan dilakukan dalam bentuk pengujian sampel pangan segar asal tumbuhan di pasar smart Pasangkayu, dimana semua sampel pangan segar asal tumbuhan yang diuji tidak ditemukan adanya cemaran biologis, kimia, atau lainnya yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan atau dapat disimpulkan bahwa persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi sebesar 100%.
5. Jumlah Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan lainnya yang dibangun, merupakan indikator program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, dimana pada tahun 2023 tidak ada penganggaran untuk pembangunan infrastruktur kemandirian pangan (lumbung pangan masyarakat dan rantai jemur) baik anggaran yang berasal dari APBD maupun APBN.
6. Kualitas Konsumsi Pangan yang diindikasikan dengan skore Pola Pangan Harapan. Skore Pola Pangan Harapan merupakan indikator

mutu, gizi dan keragaman konsumsi pangan dengan skor maksimal 100. Semakin tinggi skor PPH maka semakin beragam dan berimbang pola konsumsi penduduk. Berdasarkan survey konsumsi dan analisis pola pangan harapan tahun 2023, diperoleh hasil bahwa skor PPH Kabupaten Pasangkayu sebesar 80,2 telah memenuhi target namun demikian upaya peningkatan skor PPH masih perlu ditingkatkan melalui perbaikan kualitas konsumsi masyarakat.. Olehnya itu diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam hal mengkonsumsi pangan yang beragam, berimbang, sehat dan aman.

7. Persentase Penanganan Daerah Rentan Pangan. Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Untuk tahun 2023 tidak ada penganggaran untuk penanganan daerah rentan pangan.

Terlepas dari capaian diatas pemerintah daerah terus akan meningkatkan daya beli masyarakat. Keberhasilan kebijakan ini akan berdampak besar terhadap struktur daya beli masyarakat yang baik di Kabupaten Pasangkayu yang pada gilirannya akan memberi dampak positif pada pencapaian target akhir masa berlakunya RPJMD yakni tahun 2026

### **MISI 3 : “MENGAKSELERASI PEMERATAAN PEMBANGUNAN”**

Untuk misi “**Mengakselerasi Pemerataan Pembangunan**” bertujuan untuk Menciptakan Pemerataan Pendapatan Antar Kelompok Masyarakat. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja dapat diuraikan pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.2.7**  
**Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Sasaran : Membaiknya Taraf Hidup Masyarakat**

No	Indikator	Target (2023)	Realisasi Tahun		Capaian
			2022	2023	
1	Indeks Gini	0.308	-	0.292	105
2	Tingkat Kemiskinan	4,40	5.09	4,79	92
3	Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	77	72	77	100
4	Jumlah desa yang dievaluasi dan meningkat kualitasnya	40	25	40	100
5	Jumlah posyandu Purnama	266	206	266	100
6	Jumlah PKK aktif	94	79	94	100
7	Persentase lembaga pemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan	9	10	9	100
8	Jumlah sarana sosial	6	1	1	17
9	Persentase PMKS yang menerima bantuan	100	87,56	94,60	95
10	Peningkatan	63	63	63	100

	Kemampuan (capacitybuilding) petugas dan pendamping sosial, pembedayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya				
11	Terpenuhinya Kebutuhan Kesehatan dan Pendidikan RTSM/KS	4.536	4.437	4.932	109
12	Terlaksananya pemberian bantuan kepada masyarakat miskin	1.000	4.437	4.932	493
13	Terwujudnya keserasian sosial	3	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian target kinerja tahun 2023 untuk sasaran **Membaiknya Taraf Hidup Masyarakat** cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat indikator cukup meningkat dari tahun sebelumnya walaupun tidak dipungkiri masih ada bagian dari indikator yang belum maksimal. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh.
2. Jumlah penduduk miskin kabupaten Pasangkayu pada tahun 2023 mencapai 8.940 jiwa, menurun jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 9.300. Hal ini sejalan juga dengan persentase penduduk miskin yang turun dimana pada tahun 2022 dan 2023

masing-masing adalah sebesar 5,09 dan 4,79 persen.

3. Target akhir lembaga yang mendapatkan pemberdayaan tahun 2023 sebanyak 77 lembaga dan terealisasi sesuai dengan perencanaan atau tercapai 100%.
4. Target desa yang dievaluasi dan meningkat kualitasnya pada tahun 2023 sebanyak 40 desa dan dan terealisasi sesuai perencanaan tahun 2023 sebanyak 40 desa atau 100%.
5. Target posyandu purnama pada tahun 2023 terealisasi sebanyak 266 unit dan ini tercapai sesuai target pada tahun 2023 yaitu sebanyak 266 unit atau 100%.
6. Target PKK aktif pada tahun 2023 sebanyak 94 Klp dan terealisasi sesuai dengan perencanaan di tahun 2023 sebanyak 94 klp.
7. Target persentase lembaga masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan di tahun 2023 sebesar 100% dan terealisasi sesuai dengan perencanaan yang mana salah satu penunjang capaiannya adalah pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
8. Jumlah Sarana Sosial :yang tersedianya yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten saat ini berupa rumah singgah berjumlah 1 unit yang terletak di Kecamatan Pasangkayu yang memberikan pelayan terhadap penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) yang selama masih berfokus pada lanjut usia.anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum ,orang terlantar , serta penyandang disabilitas
9. Persentase PMKS yang menerima bantuan, baik itu yang berasal dari anggaran pemerintah daerah maupun anggaran dari pemerintah pusat, berupa bantuan bagi program keluarga harapan ( PKH), penerima bantuan iuran (PBI), bantuan permakanan,bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas,pelatihan bagi penyandang disabilitas,serta layanan social lainnya
- 10.Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping social pemberdayaan fakir miskin,KAT, dan PMKS lainnya, unutm tahun

belum dilaksanakan keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala bagi pemerintah daerah

11. Terpenuhinya kebutuhan Kesehatan, Pendidikan RTSM/KS kegiatan ini dilakukan melalui program keluarga harapan, keluarga penerima manfaat mendapatkan bantuan bagi anak sekolah SD, SMP, SMA/SMK yang diterima pertriwulan
12. Terlaksananya pemberian bantuan kepada masyarakat miskin melalui program keluarga harapan ( PKH), penerima bantuan iuran (PBI), bantaun pangan non tunia BPNT, bantuan permakanaan, bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas, pelatihan bagi penyandang disabilitas, yang berikan kepada „masyarakat miskin
13. Terwujudnya keserasian social kegiatan ini dilaksanakan Kerjasama dengan pemerintah pusat untuk tahun 2023 pemerintah kabupaten tidak menerima.

Terlepas dari capaian diatas pemerintah daerah terus akan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Keberhasilan kebijakan ini akan berdampak besar terhadap taraf hidup masyarakat yang baik di Kabupaten Pasangkayu yang pada gilirannya akan memberi dampak positif pada pencapaian target akhir masa berlakunya RPJMD yakni tahun 2026

**Tabel 3.2.8**  
**Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Sasaran : Membaiknya Pemerataan Infrastruktur**

No	Indikator	Target (2023)	Realisasi Tahun		Capaian
			2022	2023	
1	Indeks Infrastruktur				

2	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	136	159,27	214,55	158
3	Jumlah SDM/masyarakat yang mengikuti sosialisasi/ pelatihan penanggulangan bencana	-	200	-	-
4	Persentase Kejadian Bencana yang Tertangani	100	100	100	100
5	Persentase Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang Terlaksana	100	100	100	100
6	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Berjalan Sesuai Standar	276	188	256	93
7	Persentase sarana dan prasarana pelayaran dalam kondisi baik	2	2	2	100
8	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	500	5	-	-
9	Terwujudnya izin pembangunan dan pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh	2	-	-	-

10	Fasilitasi Penanganan Permasalahan Pertanahan	4	2	3	75
----	---	---	---	---	----

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian target kinerja tahun 2023 untuk sasaran **Membbaiknya Pemerataan Infrastruktur** cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat indikator cukup meningkat dari tahun sebelumnya walaupun tidak dipungkiri masih ada bagian dari indikator yang belum maksimal. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indeks Infrastuktur belum diukur oleh Perangkat Daerah terkait
2. Adanya Peningkatan Anggaran DAK yang diperoleh pada Tahun 2023, Persentase Kelayakan Jalan dalam Wilayah Kabupaten semakin meningkat
3. Pelaksanaan sub kegiatan sosialisasi dan pelatihan kebencanaan tidak dapat dilaksanakan di tahun anggaran 2023 dikarenakan keterbatasan anggaran. Namun upaya sosialisasi kebencanaan tetap dilakukan secara maksimal dengan memanfaatkan berbagai media, seperti media sosial maupun sosialisasi langsung ke masyarakat terdampak bencana.
4. Kejadian bencana di kabupaten pasangkayu tahun 2023 yang paling dirasakan adalah bencana hidrometeorologi (kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan). Untukantisipasi dan penanganan dampak kejadian bencana tersebut, BPBD kabupaten pasangkayu telah menetapkan SK darurat bencana yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan posko darurat bencana yang bertujuan memberikan bantuan dan pelayanan kepada masyarakat.
5. Rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan di tahun 2023 adalah dengan melakukan penyusunan dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3P).
6. Sasaran Persentase Penyelenggaraan Lalulintas Angkutan Berjalan

Sesuai Standar dengan target kinerja rata rencana tahun 2023 mencapai kinerja rata-ratanya 98.19%. Keberhasilan pencapaian sasaran stratejik tersebut didukung oleh keberhasilan pencapaian program/kegiatan sebagai berikut :

- a. Hasil Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum LPJU Terlaksana dengan baik dan selesai 93.12 %.
  - b. Sehingga dengan kondisi pengadaan Lampu Jalan Umum (LPJU) 256 Unit menerangi jalan umum Desa Martasari, Ruas Jalan Ir. Soekarno dan Ruas Jalan Muh. Hatta dalam Kota Pasangkayu.
  - c. Pada Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dilakukan perbaikan 1 unit alat pengujian kelayakan kendaraan, serta Pengadaan 3 Unit Alat Baru yang akan mengoptimalkan pelayanan pengujian Kendaraan.
  - d. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan yang pada awalnya direncanakan 4 kali kegiatan, tapi pada realisasinya telah dilakukan 4 kali kegiatan dengan melibatkan personal secara maksimal.
  - e. Tidak Didanainya Kegiatan-kegiatan wajib yang terdapat dalam IKK dinas Perhubungan sehingga Pesentase Capaian Belum Optimal
7. Sasaran Persentase sarana dan prasarana pelayaran dalam kondisi baik rata-ratanya 100%. Pada dasarnya untuk sasaran ini tidak mendapatkan penganggaran khusus pada DPA Dinas Perhubungan tahun 2023, sehingga kegiatan urusan laut mendapat pembiayaan dari pendanaan umum OPD. Persentase realisasi sasaran ini dinilai dari koordinasi dengan pihak-pihak terkait dimana memperoleh hasil optimal yaitu:
- a. MoU dengan Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan tentang rencana Pelayanan Pelayaran antar Pulau.
  - b. Kegiatan Survai Aset-aset Daerah yang tercatat pada Dinas Perhubungan dengan tujuan validasi terdap data asset diantaranya Data Aset Pelabuhan, Data Tambatan Perahu, Data Pelabuhan yang dibangun Rakyat, Data Kondisi Penyeberangan Sungai.
8. Penyediaan rumah layak huni tidak terlaksana dengan

maksimal karena belum adanya pengembangan kawasan permukiman terpadu dan belum adanya lokasi yang disediakan khusus untuk perumahan serta terbatasnya alokasi anggaran.

9. Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian lingkungan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh tidak terlaksana karena terbatasnya alokasi anggaran.

10. Inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan berdasarkan pengaduan masyarakat terhadap 4 (empat) pengaduan, 3 (tiga) permasalahan telah diselesaikan.

Terlepas dari capaian diatas pemerintah daerah terus akan meningkatkan pemerataan infrastruktur. Keberhasilan kebijakan ini akan berdampak besar terhadap infrastruktur masyarakat yang baik di Kabupaten Pasangkayu yang pada gilirannya akan memberi dampak positif pada pencapaian target akhir masa berlakunya RPJMD yakni tahun 2026

**MISI 4 : “MEWUJUDKAN RUANG DAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN”**

Untuk misi “Mewujudkan Ruang dan Lingkungan Yang Berkelanjutan” bertujuan untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja dapat diuraikan pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.2.9**  
**Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Sasaran : Membaiknya Kualitas Air**

No	Indikator	Target (2023)	Realisasi Tahun		Capaian
			2022	2023	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71.25	76.00	76,44	107
2	Indeks Kualitas Air	50,20	61.52	60.27	120

3	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	44.94	44.63	46.59	104
4	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	4	69.36	70.8	1770
5	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	6.5	57.99	59.52	916
6	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air yang Tidak Tersumbat	60	62	64	107

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian target kinerja tahun 2023 untuk sasaran **Membaiknya Kualitas Air** cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat indikator cukup meningkat dari tahun sebelumnya walaupun tidak dipungkiri masih ada bagian dari indikator yang belum maksimal. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dipengaruhi oleh pesatnya pertumbuhan ekonomi dan adanya pergeseran ke sektor jasa, IKLH juga dipengaruhi oleh tingkat pencemaran air, adanya ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Jadi meningkatnya indeks kualitas lingkungan dipengaruhi oleh meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat juga lebih memperhatikan penggunaan sumber daya alam agar tidak menggunakan secara berlebihan.
2. Indeks Kualitas Air (IKA) Menurun di tahun 2023 dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran masyarakat mencemari air, dan pentingnya air yang bersih bagi kehidupan makhluk hidup

3. Kenaikan Persentase disebabkan antara lain : Adanya dukungan pendanaan melalui DAK Bidang Irigasi, karena adanya P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) yang memelihara Jaringan Irigasi.
4. Adanya Dukungan Pendanaan melalui DAK Bidang Air Minum
5. Adanya Anggaran untuk Pembangunan Sarana Sanitasi di Tahun 2023
6. Adanya Anggaran untuk Pembangunan Drainase di Tahun 2023

Terlepas dari capaian diatas pemerintah daerah terus akan meningkatkan kalitas air. Keberhasilan kebijakan ini akan berdampak besar terhadap kualitas air di Kabupaten Pasangkayu yang pada gilirannya akan memberi dampak positif pada pencapaian target akhir masa berlakunya RPJMD yakni tahun 2026

**Tabel 3.2.10**  
**Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Sasaran : Membaiknya Kualitas Udara**

No	Indikator	Target (2023)	Realisasi Tahun		Capaian
			2022	2023	
1	Indeks Kualitas Udara	92,58	95.16	96.51	104
2	Luasan RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota / Perkotaan	2 Ha	2 Ha	2 Ha	100

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian target kinerja tahun 2023 untuk sasaran **Membaiknya Kualitas Udara** cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat indikator cukup meningkat dari tahun sebelumnya walaupun tidak dipungkiri masih ada bagian dari indikator yang belum maksimal. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indek Kualitas Udara dipengaruhi oleh kondisi cuaca (arah angin, kecepatan angin), suhu, curah hujan, bentang alam dilokasi penempatan peralatan, kondisi peralatan dan aktivitas kegiatan/usaha yang menghasilkan cemaran/emisi setempat. Indeks Kualitas Udara meningkat dikarenakan factor yang mempengaruhi kondisi tersebut sangat baik
2. Luasan RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota / Perkotaan tercapai karena dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran, alokasi ruang terbuka hijau, implementasi rencana kerja terkait RTH, partisipasi masyarakat, pengaruh tokoh masyarakat, keberadaan komunitas hijau.

Terlepas dari capaian diatas pemerintah daerah terus akan meningkatkan kualitas udara. Keberhasilan kebijakan ini akan berdampak besar terhadap kualitas udara yang baik di Kabupaten Pasangkayu yang pada gilirannya akan memberi dampak positif pada pencapaian target akhir masa berlakunya RPJMD yakni tahun 2026

**Tabel 3.2.11**  
**Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Sasaran : Membaiknya Kualitas Lahan**

No	Indikator	Target (2023)	Realisasi Tahun		Target (2026)
			2022	2023	
1	Indeks Kualitas Lahan	67.78	65.43	67.08	99
2	Persentase hasil kajian KLHS yang ditindaklanjuti	1	2	2	50

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian target kinerja tahun 2023 untuk sasaran **Membaiknya Kualitas Lahan** cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat indikator cukup meningkat dari tahun sebelumnya walaupun

tidak dipungkiri masih ada bagian dari indikator yang belum maksimal. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas lahan (IKL) sebagai satu-satunya indekator yang mewakili isu hijau dan ini dipengaruhi oleh tingginya kesadaran masyarakat untuk tidak merambah hutan, menebang pohon secara serampangan,tidak menerapkan sistem tebang pilih.
2. KLHS dipengaruhi oleh regulasi yang mengatur tentang kewajiban setiap daerah untuk menyusun KLHS dan kesadaran,kepedulian dan komitmen dari pemerintah, dan juga tersedianya dana yang dapat dialokasikan.

Terlepas dari capaian diatas pemerintah daerah terus akan meningkatkan kualitas lahan. Keberhasilan kebijakan ini akan berdampak besar terhadap kualitas lahan yang baik di Kabupaten Pasangkayu yang pada gilirannya akan memberi dampak positif pada pencapaian target akhir masa berlakunya RPJMD yakni tahun 2026.

**MISI 5: “MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BERMARTABAT (BERSIH, EFEKTIF DAN TERPERCAYA)”**

Untuk misi “**Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Bermartabat (Bersih, Efektif dan Terpercaya)**” bertujuan untuk Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pemerintahan Yang Bersih. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja dapat diuraikan pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.2.12**

**Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama**

**Sasaran : Meningkatkan Kepuasan Publik Atas Layanan Pemerintah**

No	Indikator	Target (2023)	Realisasi Tahun		Capaian
			2022	2023	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	CC	CC	100

2	Indeks Kepuasan Masyarakat	78	-	70,88	91
3	Jumlah Perda Yang di Tetapkan	9	6	4	44
4	Jumlah Produk Dokumentasi, Publikasi dan Informasi DPRD yang di Sebarluaskan	39	39	39	100
5	Jumlah Laporan, Ikhtisar dan Realisasi Keuangan DPRD	7	7	7	100
6	Jumlah Rapat-Rapat Konsultasi, Koordinasi Keluar dan Dalam Daerah	30	30	30	100
7	Indeks profesionalitas ASN	76	49.27	54.76	72
8	Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan	85	78	95.85	113
9	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	80	100	82.35	103
10	Jumlah Pengunjung Perpustakaan PerTahun	5.288	207	581	11
11	Persentase pemenuhan	96	100	100	104

	kebutuhan perangkat daerah				
12	Jumlah perangkat daerah yang mengelola asrip secara baku	9	32	32	355
13	Jumlah SDM pengelola kearsipan yang tersertifikasi	12	2	2	16
14	Terwujudnya penyebaran informasi pemerintah daerah	48	41	30	62
15	Rasio pasangan berakta nikah	1.00	1,00	1.00	100
16	Cakupan penerbitan akta kelahiran	100	100	100	100
17	Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk	0.72	0,79	0.80	111
18	Rasio Bayi Berakta Kelahiran	0.94	0,90	0.87	92
19	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	88	86,73	80	91
20	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan	14	6	4	29
21	Persentase perumusan kebijakan teknis bidang kebakaran dan penyelamatan	90-100	100	100	100
22	Persentase pelaksanaan pencegahan, penanggulangan,	90-100	47.32	23.12	26

	penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran				
23	Persentase pengembangan dan pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan pemberdayaan masyarakat	90-100	-	45.45	50

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian target kinerja tahun 2023 untuk sasaran **Meningkatnya Kepuasan Publik Atas Layanan Pemerintah** cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat indikator cukup meningkat dari tahun sebelumnya walaupun tidak dipungkiri masih ada bagian dari indikator yang belum maksimal. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu memenuhi target namun masih banyak yang perlu dibenahi diantaranya:
  - Peran aktif tim Reformasi Birokrasi
  - Mengoptimalkan Kualitas Pelayanan Publik
  - Keselarasan dokumen kinerja
2. Nilai IKM di lingkup Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2023. Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan SKM yang sudah dilakukan, sebanyak 3 SKPD telah menyampaikan laporannya. Dan masih banyak yang belum menyampaikan laporannya. Dari seluruh SKPD yang telah melaporkan hasil SKM, telah terdapat rencana tindak lanjut terhadap unsur layanan yang menjadi prioritas perbaikan. Inovasi pelayanan publik dalam bentuk terobosan-terobosan pelayanan diperlukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik

agar kepuasan masyarakat meningkat. Pelaksanaan pelayanan publik di lingkup Pemerintah Kabupaten pasangkayu, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM rata-rata yaitu 85,67.

3. Jumlah Perda yang ditetapkan dengan target 9 Perda dan terealisasi sebanyak 4 Perda dengan persentase 44,44 %, hal ini disebabkan Tumpang tindihnya dengan agenda lain DPRD sehingga beberapa Agenda Pembahasan tidak terlaksana
4. Jumlah produk dokumentasi, publikasi dan informasi DPRD yang disebarluaskan dapat terealisasi sebesar 100%, realisasi tersebut diperoleh 39 Media yang mempublikasikan informasi DPRD.
5. Jumlah laporan, ikhtisar dan realisasi keuangan DPRD terealisasi 100%, realisasi tersebut diperoleh dengan tersusunnya laporan-laporan iktisar dan keuangan DPRD, Memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang ada.
6. Jumlah rapat - rapat konsultasi, koordinasi keluar dan dalam daerah teresalisasi 100%, realisasi tersebut diperoleh terlaksananya perjalanan dinas konsultasi dan koordinasi Pimpinan dan anggota DPRD, Penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.
7. Indikator kinerja ini berdasarkan sasaran strategis yakni meningkatnya manajemen pembinaan dan pengembangan pola karir serta iklim kerja aparatur. Pencapaian sasaran strategis ini diukur dari indikator indeks profesionalitas ASN. Indeks profesionalitas ASN diukur dengan empat dimensi antara lain : dimensi kualifikasi, dimensi kompetensi, dimensi kinerja (target dan pencapaian) dan dimensi disiplin.
8. Indikator kinerja persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan diukur berdasarkan jumlah ASN yang telah mengikuti bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan.
9. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja capaian indikator kinerja utama SATPOL PP tahun 2023 mencapai 82,35 % ini berarti melebihi target yang direncanakan sebesar 80,00 %. Keberhasilan tersebut didukung

oleh berbagai faktor, diantaranya :

- a. Peran aktif masyarakat dalam peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- b. Patroli wilayah secara rutin dan Sosialisasi Perda oleh SatPol PP mampu memberi pemahaman akan Peraturan Daerah.
- c. Operasi Penertiban yang dilaksanakan secara terjadwal yang oleh Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

10. Jumlah pengunjung yang cenderung tidak sesuai target dikarenakan masih kurangnya minat baca di kalangan masyarakat, di samping itu masih kurangnya koleksi perpustakaan dan prasarana penunjang lainnya untuk menarik minat kunjung dan baca masyarakat ke perpustakaan.

11. Capaian kinerja dari Presentase pemenuhan kebutuhan Perangkat Daerah adalah 100 % dengan dukungan pelaksanaan beberapa Kegiatan/Sub Kegiatan rutin pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dari target yang ditetapkan sebesar 94 %

12. Pada Indikator sasaran Jumlah Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku setelah dilakukan pendataan pada tahun 2022 terdapat 32 OPD telah melakukan pengelolaan arsip dengan baik dalam pengarsipan:

- a. Arsip Persuratan ; meliputi surat masuk dan surat keluar
- b. Arsip kepegawaian ; data-data kepegawaian
- c. Arsip Dokumen Perencanaan dan evaluasi anggaran
- d. Arsip Inventaris barang

Dan untuk tahun 2023 kami tidak melakukan kegiatan pengawasn kearsipan karena tidak ada dukungan anggaran untuk bidang kearsipan.

13. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan kearsipan. Dari target yang ditetapkan tahun 2023 sebanyak 12 orang, Realisasi berdasarkan SK pelantikan Bupati Pasangkayu sebanyak 2 orang tenaga fungsional arsiparis atau 16 %. Tahun 2023 tidak

ada dukungan kegiatan yang dilaksanakan untuk bidang kearsipan karena terbatasnya pagu anggaran tahun 2023.

14. Persyaratan permohonan kerjasama media tidak memenuhi syarat, sehingga target 48 hanya terealisasi 30.
15. Rasio pasangan berakta nikah yang mana diketahui bahwa akta nikah hanya untuk penduduk non-muslim, capaiannya adalah 100 persen dikarenakan setiap masyarakat yang mengajukan permohonan pembuatan akta nikah akan dilayani tanpa ada yang batal atau tidak terselesaikan.
16. Cakupan penerbitan akta kelahiran yaitu 100 persen diperoleh dari pelayanan yang seluruhnya dilayani tanpa ada yang batal atau tidak terlayani.
17. Tingginya realisasi rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk dipengaruhi adanya pemutakhiran data yang berakibat data jumlah penduduk (faktor pembagi, wajib KTP) menjadi berkurang akibat dari penghapusan data anomali/data ganda.
18. Rasio bayi berakta lahir belum mencapai target diakibatkan masih kurangnya pelayanan jemput bola dan percepatan pemenuhan kepemilikan akta kelahiran.
19. Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk sedikit di bawah target tahun 2023 hal ini harus menjadi perhatian untuk meningkatkan kinerja dalam pelayanan penerbitan KTP.
20. Persentase pemanfaatan data kependudukan dengan mengukur seberapa banyak perangkat daerah yang menggunakan data kependudukan sebagai data yang dapat digunakan dalam pemberian pelayanan publik, pengambilan keputusan dan kebijakan.
21. Persentase perumusan kebijakan teknis bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan dengan capaian rata-rata 100 persen di mana hasil capaian tersebut dipengaruhi rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadam kebakaran dan penyelamatan.
22. Persentase pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan

kebakaran dan penyelamatan non kebakaran dengan capaian rata-rata 23.12 persen dimana jumlah kejadian kebakaran dipersentasekan = jumlah wilayah kejadian 4 dibagi 21 kejadian di tambah dengan jumlah kejadian non kebakaran yang dipersentasekan jumlah wilayah pengaduan 2 dibagi jumlah layanan pengaduan 49 selama tahun 2023.

23. Persentase pengembangan dan pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan pemberdayaan masyarakat dengan capaian kinerja rata-rata 45.45 persen dimana hasil pencapaian tersebut dipengaruhi minat aparatur dan kurangnya ketersediaan anggaran.

Terlepas dari capaian diatas pemerintah daerah terus akan meningkatkan Kepuasan Publik Atas Layanan Pemerintah. Keberhasilan kebijakan ini akan berdampak besar terhadap Kepuasan Publik Atas Layanan Pemerintah yang baik di Kabupaten Pasangkayu yang pada gilirannya akan memberi dampak positif pada pencapaian target akhir masa berlakunya RPJMD yakni tahun 2026

**Tabel 3.2.13**  
**Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Sasaran : Membaiknya Pengelolaan Keuangan Daerah**

No	Indikator	Target (2023)	Realisasi Tahun		Capaian
			2022	2023	
1	Opini BPK	WTP	WTP	-	-
2	Presentase penyerapan APBD	100	95.68	95.43	95
3	Presentase BUMD yang dikelola	-	-	-	-
4	Presentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	5	5.56	7.25	145
5	Proporsi laporan keuangan dan laporan	100	100	100	100

	aset daerah yang tersampaikan tepat waktu				
6	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	3.0	-	2.38	79
7	Terlaksananya pengadaan barang dan jasa	5.928	100	5.928	100

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian target kinerja tahun 2023 untuk sasaran **Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah** cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat indikator cukup meningkat dari tahun sebelumnya walaupun tidak dipungkiri masih ada bagian dari indikator yang belum maksimal. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belum ada opini. BPK masih melakukan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah TA 2023.
2. Adanya keterlambatan petumjuk teknis pelaksanaan kegiatan dari menteri teknis terkait pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari dana perimbangan. Ada beberapa pihak ketiga yang belum menyelesaikan pekerjaannya sampai akhir tahun dan ada juga yang sudah selesai tapi belum terbayarkan sehingga realisasi keuangan tidak sampai 100 persen.
3. PERDA harus diubah karena tidak sesuai dengan aturan PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Perusda harus diubah ke lembaga Perumda atau Perseroda.
4. Adanya dukungan dan kerjasama seluruh perangkat daerah pengelola PAD sehingga target realisasi melebihi target kinerja dan tingginya partisipasi masyarakat dalam hal pembayaran pajak.
5. Kerjasama dari seluruh OPD dalam melakukan koordinasi dan

konsultasi dengan tim penyusun Laporan Keuangan dan laporan aset kabupaten, sehingga laporan keuangan dan laporan aset pemerintah daerah dapat tersampaikan tepat waktu, yang secara otomatis sanksi yang berupa pemotongan dana transfer pusat dapat dihindari.

6. Perangkat Daerah Tidak Mendapatkan dukungan anggaran Kegiatan dan Sarana Prasarana yang memadai
7. Terlaksananya kegiatan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Pasangkayu.

Terlepas dari capaian diatas pemerintah daerah terus akan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Keberhasilan kebijakan ini akan berdampak besar terhadap pengelolaan keuangan daerah yang baik di Kabupaten Pasangkayu yang pada gilirannya akan memberi dampak positif pada pencapaian target akhir masa berlakunya RPJMD yakni tahun 2026.

### **3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2023.**

Pelimpahan kewenangan dalam bidang fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah membawa konsekwensi yang cukup besar kepada pemerintah daerah, terutama dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah dan sekaligus memanfaatkan dan mengalokasikan sumber pendapatan daerah tersebut secara lebih efisien dan efektif.

Sumber-sumber pendapatan daerah meliputi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Diantara komponen-komponen sumber pendapatan daerah, dana transfer (dana perimbangan, dana otonom khusus, dana keistimewaan, dana desa, pendapatan bagi hasil, dan bantuan keuangan) merupakan sumber pendapatan daerah yang terbesar dan cenderung meningkat secara absolut. Berdasarkan kondisi riil perkembangan pendapatan daerah dapat disimpulkan bahwa pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer daerah.

**KABUPATEN PASANGKAYU****RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS  
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>45.440.062.097</b>	<b>46.500.506.009</b>	<b>1.060.443.912</b>	<b>2 %</b>
4.1.01	Pajak Daerah	9.762.807.100	10.802.807.100	1.040.000.000	11 %
4.1.02	Retribusi Daerah	5.382.742.525	5.382.742.525	0	0 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.159.163.585	3.179.607.497	20.443.912	1 %



4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	27.135.348.887	27.135.348.887	0	0 %
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>793.694.173.822</b>	<b>795.527.752.297</b>	<b>1.833.578.475</b>	<b>0 %</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	771.071.520.000	766.601.996.518	(4.469.523.482)	1 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	22.622.653.822	28.925.755.779	6.303.101.957	28 %
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	<b>(900.000.000)</b>	<b>75 %</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.200.000.000	300.000.000	(900.000.000)	75 %
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>840.334.235.919</b>	<b>842.328.258.306</b>	<b>1.994.022.387</b>	<b>0 %</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>504.265.554.607</b>	<b>518.684.254.049</b>	<b>14.418.699.442</b>	<b>3 %</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	295.943.427.262	297.440.557.407	1.497.130.145	1 %



5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.508.850.363	188.658.025.215	5.149.174.852	3 %
5.1.05	Belanja Hibah	22.931.276.982	32.203.671.427	9.272.394.445	40 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.882.000.000	382.000.000	(1.500.000.000)	80 %
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>241.489.047.446</b>	<b>250.817.656.872</b>	<b>9.328.609.426</b>	<b>4 %</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.776.317.450	1.755.323.100	(20.994.350)	1 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.802.344.548	53.247.243.666	444.899.118	1 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	58.253.099.121	48.790.455.194	(9.462.643.927)	16 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	128.470.876.027	146.524.532.271	18.053.656.244	14 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	186.410.300	500.102.641	313.692.341	168 %
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>14.398.105.322</b>	<b>6.285.438.637</b>	<b>(8.112.666.685)</b>	<b>56 %</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	14.398.105.322	6.285.438.637	(8.112.666.685)	56 %



<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>100.249.670.000</b>	<b>100.249.670.000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.195.000.000	1.195.000.000	0	0 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	99.054.670.000	99.054.670.000	0	0 %
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>860.402.377.375</b>	<b>876.037.019.558</b>	<b>15.634.642.183</b>	<b>2 %</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(20.068.141.456)</b>	<b>(33.708.761.252)</b>	<b>(13.640.619.796)</b>	<b>-68 %</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>20.068.141.456</b>	<b>33.708.761.252</b>	<b>13.640.619.796</b>	<b>68 %</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	20.068.141.456	33.708.761.252	13.640.619.796	68 %
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>20.068.141.456</b>	<b>33.708.761.252</b>	<b>13.640.619.796</b>	<b>68 %</b>
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>



	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>20.068.141.456</b>	<b>33.708.761.252</b>	<b>13.640.619.796</b>	<b>68 %</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Terkait dengan beban dan dinamika percepatan pembangunan daerah yang berkualitas dan inklusif, telah ditempuh kebijakan pembiayaan daerah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pengelolaan pembiayaan daerah tetap memperhatikan aspek akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas.
2. Menekan defisit anggaran pada level yang paling optimal
3. Jika APBD dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, dan pemberian pinjaman.
4. Jika APBD dalam keadaan defisit, maka kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, pencairan dana cadangan, penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan melakukan pinjaman daerah.

# **BAB IV PENUTUP**



## **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU  
TAHUN 2024**

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu tahun 2023, memuat dokumen kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu yang tercermin dalam gambaran pencapaian tujuan organisasi dan sasaran-sasarannya, melalui pengukuran tingkat pemenuhan Indikator-indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan berpatokan pada target-target yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka tergambar capaian kinerja organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu selama tahun 2023

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu yang kemudian diturunkan ke dalam 13 (tiga belas) sasaran strategis, maka diketahui bahwa pencapaian sasaran strategis tersebut rata-rata mengalami peningkatan yang baik.

Sebagai bentuk akuntabilitas, maka gambaran kinerja tahun 2023 ini disajikan dalam urutan sistematis yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian dilaporkan kepada instansi berwenang atau terkait, maupun kepada publik yang berkepentingan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Sebagai sebuah gambaran kinerja, tentunya LAKIP ini tidak bisa menyajikan keseluruhan profil capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu secara utuh. Untuk keperluan mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, maka diperlukan dokumen pelengkap seperti hasil evaluasi kinerja, LHP, maupun dokumen akuntabilitas organisasi lainnya.

Demikian LAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2023 ini disusun, dengan harapan dapat menjadi referensi yang representatif serta kredibel dalam menjelaskan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu.

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2023**



**LAMPIRAN**

**REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU  
TAHUN 2024**



**PEMERINTAHAN KAB. PASANGKAYU**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**  
**01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023**



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>817.714.349.444</b>	<b>828.495.557.776,46</b>	<b>101,32</b>	<b>842.548.646.860,12</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>61.417.779.583</b>	<b>59.323.700.752,46</b>	<b>96,59</b>	<b>46.833.564.003,12</b>
4.1.01	Pajak Daerah	15.197.000.000	16.770.733.204,00	110,36	11.816.980.971,58
4.1.02	Retribusi Daerah	5.814.633.543	4.700.984.898,00	80,85	3.279.849.140,50
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.159.163.585	3.146.110.906,00	99,59	3.179.607.497,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	37.246.982.455	34.705.871.744,46	93,18	28.557.126.394,04
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>61.417.779.583</b>	<b>59.323.700.752,46</b>	<b>96,59</b>	<b>46.833.564.003,12</b>
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>755.696.569.861</b>	<b>768.642.185.044,00</b>	<b>101,71</b>	<b>795.300.374.807,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	723.264.553.723	735.682.156.030,00	101,72	763.190.288.910,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	32.432.016.138	32.960.029.014,00	101,63	32.110.085.897,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>600.000.000</b>	<b>529.671.980,00</b>	<b>88,28</b>	<b>414.708.050,00</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	600.000.000	529.671.980,00	88,28	414.708.050,00
	<b>JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>600.000.000</b>	<b>529.671.980,00</b>	<b>88,28</b>	<b>414.708.050,00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>817.714.349.444</b>	<b>828.495.557.776,46</b>	<b>101,32</b>	<b>842.548.646.860,12</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>856.001.514.444</b>	<b>816.842.187.835,00</b>	<b>95,43</b>	<b>837.970.243.112,24</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>540.152.437.945</b>	<b>515.832.751.760,00</b>	<b>95,50</b>	<b>499.339.728.495,24</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	301.334.474.131	283.442.561.180,00	94,06	292.039.202.053,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.529.105.410	198.858.337.471,00	97,23	175.452.902.211,24
5.1.05	Belanja Hibah	33.898.858.404	33.141.853.109,00	97,77	31.495.624.231,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	390.000.000	390.000.000,00	100,00	352.000.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>540.152.437.945</b>	<b>515.832.751.760,00</b>	<b>95,50</b>	<b>499.339.728.495,24</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>211.313.312.199</b>	<b>197.783.625.551,00</b>	<b>93,60</b>	<b>237.236.268.565,00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.000.118.500	999.732.700,00	99,96	1.703.032.928,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.847.937.020	23.481.480.203,00	87,46	49.711.893.112,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	69.132.238.064	64.160.323.251,00	92,81	47.336.732.078,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	114.232.720.715	109.042.548.297,00	95,46	137.995.574.447,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	98.521.900	97.765.100,00	99,23	489.036.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.776.000	1.776.000,00	100,00	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>211.313.312.199</b>	<b>197.783.625.551,00</b>	<b>93,60</b>	<b>237.236.268.565,00</b>
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>800.000.000</b>	<b>328.780.000,00</b>	<b>41,10</b>	<b>1.907.953.000,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	800.000.000	328.780.000,00	41,10	1.907.953.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>800.000.000</b>	<b>328.780.000,00</b>	<b>41,10</b>	<b>1.907.953.000,00</b>
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>103.735.764.300</b>	<b>102.897.030.524,00</b>	<b>99,19</b>	<b>99.486.293.052,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.398.679.900	1.398.679.900,00	100,00	1.194.999.500,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	102.337.084.400	101.498.350.624,00	99,18	98.291.293.552,00
	<b>JUMLAH BELANJA TRANSFER</b>	<b>103.735.764.300</b>	<b>102.897.030.524,00</b>	<b>99,19</b>	<b>99.486.293.052,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>856.001.514.444</b>	<b>816.842.187.835,00</b>	<b>95,43</b>	<b>837.970.243.112,24</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(38.287.165.000)</b>	<b>11.653.369.941,46</b>	<b>(30,44)</b>	<b>4.578.403.747,88</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>38.287.165.000</b>	<b>38.287.165.000,57</b>	<b>100,00</b>	<b>33.708.761.252,69</b>
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>38.287.165.000</b>	<b>38.287.165.000,57</b>	<b>100,00</b>	<b>33.708.761.252,69</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	38.287.165.000	38.287.165.000,57	100,00	33.708.761.252,69
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>38.287.165.000</b>	<b>38.287.165.000,57</b>	<b>100,00</b>	<b>33.708.761.252,69</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>38.287.165.000</b>	<b>38.287.165.000,57</b>	<b>100,00</b>	<b>33.708.761.252,69</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0</b>	<b>49.940.534.942,03</b>	<b>0,00</b>	<b>38.287.165.000,57</b>

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
---------------	--------	---------------	----------------	--------	----------------

Kab. Pasangkayu, 18 Maret 2024  
Kepala BADAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH

IMRAN H.MAKMUR, S.Pi.,  
M.Si  
NIP. 197508232003121011

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri